

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2024

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan



**Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI**

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X5, No.Kav. 4-9, RT.1/RW.2
Kuningan, Kota Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, UPK Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelayanan Kesehatan tetap melaksanakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan pelayanan medis; pelaksanaan pelayanan gawat darurat; pelaksanaan pelayanan penunjang medik; pelaksanaan hubungan masyarakat, kerjasama dan kemitraan; pengelolaan data dan sistem informasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan pelaksanaan urusan administrasi UPK Kementerian Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan juga sebagai salah satu cara evaluasi yang obyektif, efektif, dan efisien. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pimpinan dan perencanaan pada tahun mendatang.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja selama tahun 2024 bagi semua pihak yang berkepentingan serta dengan adanya masukan dan umpan balik akan memberi manfaat dalam proses perbaikan kinerja Unit Pelayanan Kesehatan di masa mendatang.

Jakarta, 23 Januari 2025
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Indri Rooslamati, M.Sc., Apt
NIP. 197912232005012003

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	2
C. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS UPK	3
D. SISTEMATIKA	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. PERENCANAAN KINERJA	6
B. PERJANJIAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. PENGUKURAN KINERJA.....	9
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	10
1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan	10
2. Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	34
3. Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan	38
C. SUMBER DAYA	47
1. Sumber Daya Manusia	47
2. Sarana dan Prasarana.....	49
3. Sumber Daya Keuangan	50
4. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya.....	52
BAB IV PENUTUP.....	53
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja	8
Tabel 3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja	9
Tabel 3.2 Capaian Kepuasan Pelanggan	12
Tabel 3.3 Capaian Komplain yang Ditindaklanjuti	13
Tabel 3.4 Capaian Kelengkapan Pengisian Informed Consent	15
Tabel 3.5 Capaian Waktu Penyediaan Rekam Medis Sesuai Standar	16
Tabel 3.6 Capaian Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium RGD Sesuai Standar	17
Tabel 3.7 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar	18
Tabel 3.8 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar	19
Tabel 3.9 Capaian Kelas Edukasi Kesehatan bagi Pegawai Kemenkes	20
Tabel 3.10 Daftar Pelaksanaan Kelas Edukasi	21
Tabel 3.11 Pelatihan Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan	23
Tabel 3.12 Capaian Pelatihan Bagi Pegawai	27
Tabel 3.13 Capaian Kalibrasi Alat – Alat Kesehatan	28
Tabel 3.14 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi	29
Tabel 3.15 Capaian Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi	29
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran	30
Tabel 3.17 Capaian Indikator Laporan Keuangan Tepat Waktu	31
Tabel 3.18 Target Pendapatan PNBP	32
Tabel 3.19 Realisasi Target Pendapatan PNBP	33
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	33
Tabel 3.21 Realisasi Anggaram Bersumber Rupiah PNBP	34
Tabel 3.22 Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	35
Tabel 3.23 Jumlah Penyakit Terbanyak Tahun 2024	42
Tabel 3.24 Kunjungan Swab Antigen	43
Tabel 3.25 Data SWAB Antigen Berdasarkan Unit Kerja	44
Tabel 3.26 Kunjungan Vaksinasi Influenza dan Hepatitis B	46
Tabel 3.27 Jenis Sumber Daya Manusia	47
Tabel 3.28 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
Tabel 3.29 SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 3.30 SDM Berdasarkan Jabatan	48
Tabel 3.31 Belanja Sarana dan Prasarana	50
Tabel 3.32 Target dan Realisasi Pendapatan	51
Tabel 3.33 Realisasi Belanja TA 2024	52
Tabel 3.34 Efisiensi Anggaran TA 2024	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Trend Peningkatan Jumlah Kunjungan	4
Grafik 3.1 Indikator Kinerja Kepuasan Pelanggan Tahun 2024.....	12
Grafik 3.2 Kunjungan Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024	40
Grafik 3.3 Kunjungan per Poli Tahun 2023 dan 2024	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Klinik Pratama dan Klinik Utama UPK	1
Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPK	3
Gambar 3.2 Kelas Edukasi	22
Gambar 3.3 Pelayanan Vaksinasi Influenza dan Hepatitis B	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan beserta seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator kepuasan pelanggan 103% dengan target 95%, seluruh komplain ditindaklanjuti 105% dengan target 95%, Kelengkapan pengisian *Informed consent* 100% dengan target 100%, waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar 104% dengan target 97%, waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ruang gawat darurat sesuai standar 106% dengan target 94%, waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar 109% dengan target 90%, waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar 113% dengan target 90%, terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai Kemenkes 105% dengan target 98%, presentase pelatihan bagi pegawai UPK 105% dengan target 95%, terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan 100% dengan target 100%, adanya aplikasi sistem informasi terintegrasi 105% dengan target 95%, realisasi anggaran 103% dengan target 95%, laporan keuangan tepat waktu 105% dengan target 95%, presentase realisasi target pendapatan PNBP 147.14% dengan target >90%, presentase realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni 97.98% dengan target 90%, presentase realisasi anggaran bersumber rupiah PNBP 99.52% dengan target 95%.

Jumlah kunjungan UPK pada tahun 2024 sebanyak 21.293 kunjungan. Terdapat penurunan pada tahun 2024 sebesar 5% dibandingkan dengan kunjungan pada tahun 2023. Dikarenakan, tidak adanya pelayanan swab PCR, Spesialis konservasi gigi dan Rehabilitasi Medik. UPK juga menyelenggarakan pelayanan vaksinasi influenza dan vaksinasi hepatitis B, MCU, deteksi penyakit tidak menular dan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim.

Adapun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 adalah pada survey kepuasan terdapat kritik terkait pendaftaran untuk pelayanan poli gigi yang susah dan berbelit-belit. Pemecahan masalah dari kritik dari pelayanan poli gigi dan mulut sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes

Jakarta 1 pada tanggal 9 Agustus 2024 hal permohonan mahasiswa jurusan kesehatan gigi untuk dapat melakukan praktek kerja lapangan di UPK Kemenkes dan bersurat kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada tanggal 29 Oktober 2024 hal Permohonan Tenaga Kesehatan di UPK Kemenkes. Untuk kritik terkait kuota rujukan yang lama sudah dilakukan sosialisasi alur rujukan di media sosial UPK dan di tayangkan melalui TV LED yang berada di klinik prtama dan utama UPK Kemenkes pada tanggal 15 Juli 2024.

Pada indikator kinerja komplain yang ditindaklanjuti terdapat kendala Keterbatasan Sumber Daya dan komplain yang kompleks atau berulang. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan menambah jumlah staf khusus menangani komplain dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani keluhan pelanggan dan komplain yang berulang sudah ditindaklanjuti oleh manajemen dan pimpinan.

Pada indikator kinerja pengisian *informed consent* terdapat kendala terkait dokter tidak melengkapi diagnosa pasien dikarenakan adanya antrian yang panjang, hal ini sudah ditindaklanjuti dengan dibentuknya penanggungjawab *informed consent* yang bertugas untuk mengecek kelengkapan *informed consent*.

Pada indikator kinerja waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar dan waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar terdapat kendala terkait dengan perpindahan sistem informasi dari SIMKLINIK (sistem informasi manajemen klinik) ke SIMGos (sistem informasi manajemen *generik open source*) pada triwulan II yang menyebabkan bagian pendaftaran, dokter, perawat yang harus cepat beradaptasi dalam perubahan teknologi baru. Hal ini sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan cara *sharring knowledge* antara pranata komputer dengan bagian pendaftaran, dokter, perawat.

Pada indikator pelatihan pegawai terdapat kendala terkait dengan tidak ada anggaran untuk pelatihan individu pegawai Unit Pelayanan Kesehatan, sehingga pegawai harus mencari pelatihan yang bersifat gratis untuk memenuhi pelatihan 20JPL setahun. Hal ini sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan cara Unit Pelayanan Kesehatan mengadakan kelas edukasi dan pegawai diwajibkan untuk mengikuti pelatihan di LMS (*Learning Management System*).

Pada indikator presentase realisasi anggaran bersumber rupiah murni dan realisasi anggaran bersumber PNPB terdapat kendala terkait anggaran sewa kendaraan dan pembelian obat-obatan reagen dan BMHP yang di blokir oleh DJA.

Hal ini sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan buka blokir setelah di reviu ulang oleh DJA dengan menyampaikan data dukung RKBMN dan Perbandingan *e-katalog*, daftar *stock opname* obat-obatan reagen dan BMHP. Realisasi anggaran Unit Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.054.049.195 atau 98,1%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat. UPK menyelenggarakan pelayanan komprehensif mulai dari promotif, preventif, rehabilitatif sampai dengan kuratif.



Gambar 1.1 Klinik Pratama dan Klinik Utama UPK

UPK memiliki dua klinik yaitu Klinik Pratama Unit Pelayanan Kesehatan dan Klinik Utama Bakti Husada. Klinik pratama melayani poli umum, poli gigi umum dan kebidanan sederhana. Sedangkan Klinik Utama memiliki pelayanan spesialistik yaitu spesialis jantung, spesialis paru, spesialis rehab medik spesialis okupasi klinis serta pelayanan kegawatdaruratan medis. Klinik Utama juga memiliki pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnose klinis yakni radiologi, laboratorium, farmasi, dan fisioterapi. UPK meningkatkan kebutuhan pelayanan dengan membuka poli asuhan gizi dan poli psikologi.

Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), klinik pratama dan klinik utama telah melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Masyarakat di sekitar lingkungan Kemenkes seperti *outsourcing*, perbankan, kantin, perkantoran, dan

masyarakat umum bisa mengakses pelayanan UPK melalui kepesertaan BPJS ataupun mandiri. Klinik utama UPK menerima pelayanan rujukan spesialisik jantung dan paru dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Dengan ditetapkannya Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kementerian Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis, maka Unit Pelayanan Kesehatan sebagai satuan kerja mempunyai kewajiban untuk membuat LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UPK setiap tahun menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Kesehatan RI.

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, tugas pokok UPK adalah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pelayanan medis;
- c. Pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
- d. Pelaksanaan pelayanan laboratorium;
- e. Pelaksanaan pelayanan radiologi;
- f. Pelaksanaan pelayanan fisioterapi;
- g. Pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi;
- h. Pelaksanaan pelayanan farmasi;
- i. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerjasama, dan kemitraan;
- j. Pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan urusan administrasi UPK Kementerian Kesehatan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPK

Sejak 2020 susunan organisasi UPK terdiri atas dua struktural yaitu Kepala UPK dan Kepala Subbagian administrasi umum, serta kelompok jabatan fungsional. Untuk koordinasi penyelenggaraan fungsi UPK, UPK memiliki koordinator jabatan fungsional kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan dan koordinator jabatan fungsional substansi pelayanan penunjang medik.

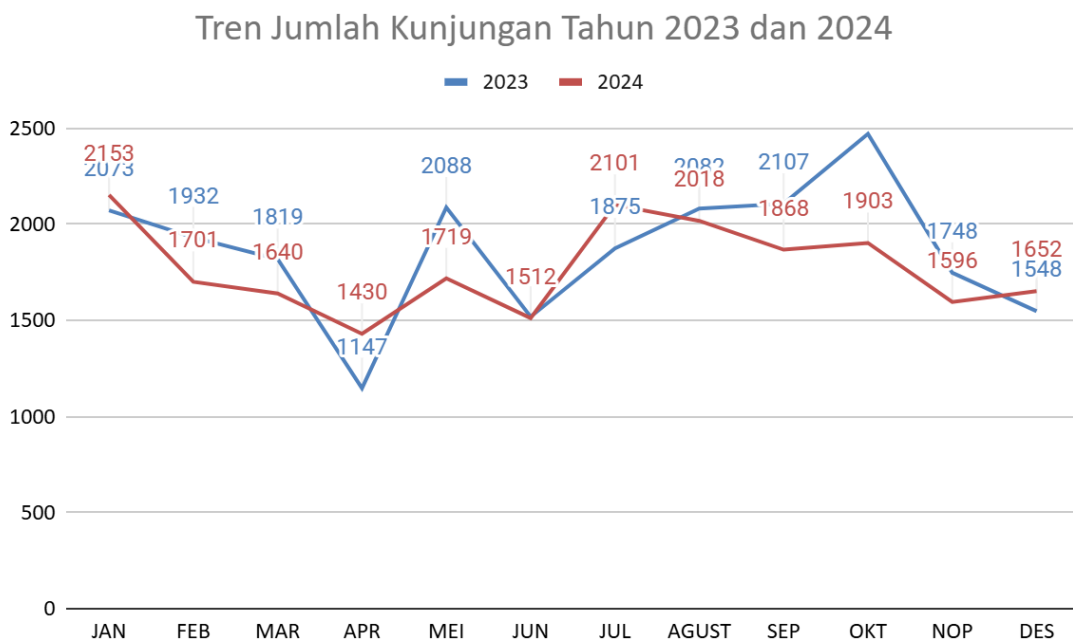
Pada tahun 2024 UPK memiliki SDM sebanyak 46 orang yang terdiri dari 34 PNS dan 5 PPPK serta 7 tenaga honorer (PPNPN). Pada tahun ini UPK membuka pelayanan baru yaitu psikologi klinis dan konsultasi gizi. Pelayanan psikologi klinis perlu untuk kebutuhan konsultasi pegawai yang memiliki gejala stress akibat kerja ataupun lainnya. Pelayanan konsultasi gizi untuk melengkapi pelayanan pasien penyakit kronis, ibu hamil, bayi balita, dan juga keluhan berat badan pegawai.

C. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS UPK

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) awalnya adalah Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) dan dikelola di bawah naungan Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. Sejak terbitnya Permenkes nomor 32 tahun 2012, Balkesmas dirubah namanya menjadi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan atau disingkat dengan nama UPK.

UPK memiliki dua klinik yaitu Klinik Pratama Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Klinik Utama Bakti Husada. Berlokasi di Kementerian Kesehatan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain melayani pegawai kantor pusat baik PNS, pramubakti maupun *outsourcing*, UPK juga melayani masyarakat sekitar seperti pegawai kantin, perkantoran dan bisnis, peserta BPJS, dan masyarakat umum. Pelayanan kegawatdaruratan umumnya berasal dari pegawai maupun tamu yang mendapatkan gejala akut dan juga korban kecelakaan lalu lintas disekitar jalan rasuna said.

Grafik 1. 1 Trend Peningkatan Jumlah Kunjungan



***Sumber Data SIMKLINIK**

Total kunjungan rutin pada tahun 2023 sebanyak 22.409 kunjungan, sedangkan pada tahun 2024 tercatat 21.293 kunjungan, menunjukkan penurunan sebesar 5%. Tren kunjungan di kedua tahun tersebut cenderung memiliki pola yang serupa, dengan jumlah kunjungan tertinggi terjadi pada bulan Mei dan Agustus, serta penurunan signifikan pada bulan April dan Desember. UPK Kemenkes memberikan pelayanan medis dan pelayanan rutin seperti vaksin hepatitis, influenza, dan program PROLANIS yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan pegawai Kemenkes.

Tantangan dalam pengembangan sistem informasi turut memengaruhi optimalisasi layanan kesehatan. Pada tahun 2024, UPK menghadapi kendala dalam pengembangan SIMKLINIK dan SIMGOS, terutama terkait kebutuhan rekam medis yang terpisah antara klinik pratama dan utama, integrasi dengan BPJS, serta pengembangan modul pelayanan baru yang belum terealisasi. Meskipun SIMGOS telah terintegrasi dengan platform "Satu Sehat" dan mulai digunakan oleh Klinik Pratama, kebijakan pengembangan aplikasi satu pintu melalui Digital Transformation Office (DTO) dan Pusat Data Teknologi Informasi masih belum sepenuhnya mendukung kebutuhan UPK.

D. SISTEMATIKA

Ruang lingkup laporan berkala Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2024 meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang penyusunan laporan kinerja dan penjelasan umum organisasi dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan tentang sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang ingin dicapai.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, realisasi anggaran, serta sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan.

4. BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sasaran Strategis Unit Pelayanan Kesehatan termuat dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB). RSB merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, yang disusun oleh sebuah tim dengan melibatkan seluruh manajemen puncak di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Adapun gambaran umum dari RSB Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadi sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan”

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- c. Memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan standar.
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital.

3. Tujuan

“Memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan Kementerian Kesehatan dan masyarakat umum yang berkualitas.”

4. Tata Nilai

a. Tepat

Ketepatan dalam pemberian pelayanan dan obat tepat guna terhadap pasien.

b. Ramah

Menerapkan 3S yaitu Senyum, Salam, dan Sapa terhadap siapa saja

yang mengunjungi UPK, baik pasien maupun rekan kerja.

c. Utamakan Selamat

Mengutamakan keselamatan pasien yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan.

d. Sigap

Berbuat atau bertindak dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan cepat, semangat serta meyakinkan.

e. Terpadu

Kesatuan sistem pelayanan terhadap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dimulai pasien datang sampai mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.

5. Tujuan Rencana Strategi Bisnis UPK Kemenkes, yaitu:

- a. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- b. Sebagai dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- c. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam yang merupakan indikasi program APBN.
- d. Tersedianya indikator penilaian evaluasi kinerja Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- e. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam rangka peningkatan upaya kesehatan perorangan yang berorientasi pada pelayanan *stakeholder oriented* prima berdasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik dan bersih serta terwujudnya komitmen bersama Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari UPK dalam indikator kinerja dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis UPK Tahun 2020 – 2024.

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan	1.	Tingkat kepuasan pelanggan	95%
		2.	Komplain yang ditindaklanjuti	95%
2.	Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas	1.	Kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	100%
		2.	Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar	94%
		3.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar	94%
		4.	Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar	90%
		5.	Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar	90%
3.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM	1.	Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai kemenkes	98%
		2.	Persentase pelatihan bagi pegawai UPK	95%
4.	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.	Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan	100%
5.	Terwujudnya Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi	1.	Adanya aplikasi sistem informasi terintegrasi	95%
6.	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	1.	Realisasi Anggaran	95%
		2.	Laporan Keuangan Tepat Waktu	95%
7.	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan	1.	Presentase Realisasi Target Pendapatan PNBPNBP	Lebih dari 90%
		2.	Presentase Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah Murni	90%
		3.	Presentase Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah PNBPNBP	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2006). Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting sebagai bahan evaluasi terhadap capaian atas target yang telah disepakati sehingga diketahui permasalahan dan dapat dilakukan bahan pertimbangan untuk pencapaian target di tahun yang akan datang. Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Tingkat capaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1.	Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan	1.	Tingkat kepuasan pelanggan	95%	98%
		2.	Komplain yang ditindaklanjuti	95%	100%
2.	Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas	1.	Kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	100%	100%
		2.	Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar	94%	97%
		3.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar	94%	100%
		4.	Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar	90%	98%
		5.	Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar	90%	99%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
3.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM	1.	Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai kemenkes	98%	100%
		2.	Persentase pelatihan bagi pegawai UPK	95%	100%
4.	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.	Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan	100%	100%
5.	Terwujudnya Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi	1.	Adanya aplikasi sistem informasi terintegrasi	95%	100%
6.	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran	1.	Realisasi Anggaran	95%	98%
		2.	Laporan Keuangan Tepat Waktu	95%	100%
7.	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan	1.	Presentase Realisasi Target Pendapatan PNB	> 90%	147,1%
		2.	Presentase Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah Murni	90%	97,98%
		3.	Presentase Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah PNB	95%	99,52%

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan

Pencapaian indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Kepuasan *Stakeholder*

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang pertama yaitu terwujudnya kepuasan stakeholder. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Indikator dan capaian dari indikator pada sasaran strategis terwujudnya kepuasan stakeholder adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Kepuasan Pelanggan

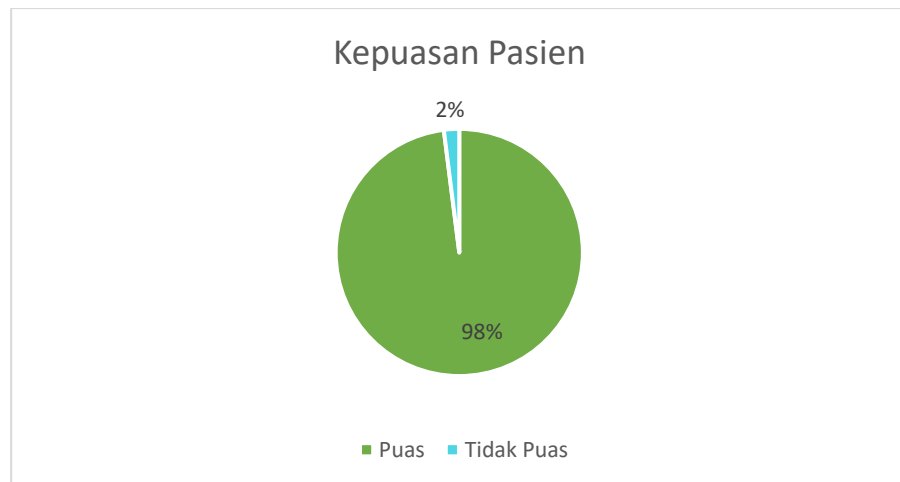
Secara definisi, pengembangan tingkat kepuasan pelanggan yang tercantum dalam Rencana Strategi Bisnis Unit Pelayanan Kesehatan adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan medik dan

keperawatan, pelayanan penunjang, dan sarana prasarana di Unit Pelayanan Kesehatan yang diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan.

Kepuasan pasien merupakan *outcome* dari layanan kesehatan yang baik. Kepuasan pasien merupakan salah satu tujuan dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dapat dibuktikan bahwa pasien atau masyarakat yang mengalami kepuasan terhadap layanan kesehatan yang diselenggarakan cenderung mematuhi nasihat atau taat terhadap rencana pengobatan. Sebaliknya, pasien yang tidak merasakan kepuasan atau mengalami kekecewaan sewaktu menggunakan layanan kesehatan cenderung tidak mematuhi rencana pengobatan, tidak mematuhi nasihat, berganti dokter, dan pindah fasilitas layanan kesehatan. Oleh sebab itu, reorientasi tujuan dari organisasi layanan kesehatan agar semakin terfokus pada keinginan pasien (Pohan, 2006).

Kepuasan pelanggan di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI diukur dengan pengisian melalui link *google form* dan *barcode survey* yang di tempel di tiap poli. Indikator kepuasan pelanggan yang diukur melalui kuesioner terdiri dari 13 Indikator yang disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu : Kemudahan Persyaratan, Kemudahan Pelayanan, Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan, Kesesuaian Biaya, Kewajaran Biaya, Kesesuaian Pelayanan yang dijelaskan petugas, Kompetensi/Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, Perilaku Petugas, Kualitas Sarana dan Prasarana, Kenyamanan Ruang Tunggu. Berdasarkan hasil analisis, pencapaian indikator kinerja utama terkait pengembangan tata kelola kepuasan pasien adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1 Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pelanggan Tahun 2024



Berdasarkan grafik 3.1. terlihat bahwa sebagian besar pasien puas terhadap pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yaitu sebesar 98%. Jika dibandingkan realisasi indikator kinerja kepuasan pelanggan tahun 2024 dengan realisasi indikator kinerja kepuasan pelanggan tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kepuasan Pelanggan

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepuasan Pelanggan	95%	98%	103%	94%	99%	106%	92%	98%	106%

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa indikator kinerja pengembangan tata kelola kepuasan pelanggan telah mencapai target. Realisasi Capaian kepuasan pelanggan pada tahun 2024 sebesar 98%. Terdapat penurunan realisasi 1% kepuasan pelanggan dibandingkan tahun 2023 sebesar 99%.

Terdapat kritik terkait pendaftaran untuk pelayanan poli gigi yang susah dan berbelit-belit. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan tenaga dokter dan perawat gigi, sehingga diberlakukan kuota pasien gigi. Selain itu, pasien mengeluhkan terkait mendapatkan rujukan yang sangat lama.

Pemecahan masalah dari kritik dari pelayanan pol igigi dan mulut sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Direktur Politeknik

Kesehatan Kemenkes Jakarta 1 pada tanggal 9 Agustus 2024 hal permohonan mahasiswa jurusan kesehatan gigi untuk dapat melakukan praktek kerja lapangan di UPK Kemenkes dan bersurat kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada tanggal 29 Oktober 2024 hal Permohonan Tenaga Kesehatan di UPK Kemenkes.

Untuk kritik terkait kuota rujukan yang lama sudah dilakukan sosialisasi alur rujukan di media sosial UPK dan di tayangkan melalui TV LED yang berada di klinik prtama dan utama UPK Kemenkes pada tanggal 15 Juli 2024.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

2) **Komplain yang ditindaklanjuti**

Komplain merupakan bentuk ungkapan ketidakpuasan atau ketidaksesuaian terhadap layanan yang diterima. Sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, Unit Pelayanan Kesehatan sering menerima komplain dari pasien yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Komplain yang masuk memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Berikut ini adalah persentase komplain yang ditindaklanjuti di Unit Pelayanan Kesehatan pada tahun 2024, dengan perbandingan terhadap tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2022.

Tabel 3.3 Capaian Komplain yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Komplain yang ditindaklanjuti	95%	100%	105%	94%	100%	106%	92%	100%	108%

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa indikator kinerja komplain yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 telah mencapai target. Realisasi komplain yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 sebesar 100%, pada tahun 2023 dan 2022 realisasi komplain yang ditindaklanjuti 100%. Hal

ini menjadi dasar bagi Unit Pelayanan Kesehatan untuk terus menindaklanjuti komplain yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung.

Unit Pelayanan Kesehatan menerima 36 komplain pada tahun 2024. Komplain yang masuk ke Unit Pelayanan Kesehatan selalu diupayakan untuk ditindaklanjuti.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

Meskipun Unit Pelayanan Kesehatan telah berhasil menindaklanjuti 100% komplain yang diterima pada tahun 2024, tentu ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut. Berikut adalah beberapa kendala yang umumnya terjadi serta pemecahan masalah yang dapat diterapkan:

a) Kendala : Keterbatasan Sumber Daya

Deskripsi Kendala: Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan tenaga kerja atau sumber daya yang memadai untuk menangani komplain secara cepat dan efektif, terutama jika jumlah komplain meningkat atau kompleksitas masalah yang dihadapi tinggi.

Pemecahan Masalah: Menambah jumlah staf yang khusus menangani komplain dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani keluhan pelanggan.

b) Kendala: Komplain yang Kompleks atau Berulang

Deskripsi Kendala: Beberapa komplain mungkin lebih kompleks atau bahkan berulang, yang memerlukan waktu lebih lama dan solusi yang lebih mendalam untuk diselesaikan. Hal ini dapat mempengaruhi waktu penyelesaian dan kepuasan pengadu.

Pemecahan Masalah: Komplain yang berulang sering kali mencerminkan adanya masalah mendasar yang belum terselesaikan secara tuntas. Dalam situasi ini, tindakan tegas dari manajemen sangat diperlukan untuk mengatasi penyebab utama dan mencegah komplain serupa muncul kembali.

b. Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang kedua yaitu terwujudnya pelayanan yang berkualitas. Sasaran ini memiliki lima indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Indikator dan capaian dari indikator adalah sebagai berikut:

1) Kelengkapan Pengisian *Informed Consent*

Kelengkapan pengisian informed consent adalah seluruh informasi yang diperlukan dalam informed consent terisi dengan lengkap. Pengukuran dilakukan dengan formula, Jumlah informed consent lengkap / Jumlah pasien yang mendapatkan tindakan medis x 100%.

Tabel 3.4 Capaian Kelengkapan Pengisian *Informed Consent*

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kelengkapan Pengisian <i>Informed Consent</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat bahwa indikator kinerja kelengkapan *informed consent* tahun 2024 sudah mencapai target dengan nilai capaian sebesar 100%. Pada tahun 2023 dan tahun 2022, capaian mencapai 100%.

Dalam pengisian *informed consent*, UPK tetap berupaya mengisi seluruh *informed consent* sebagai bentuk perlindungan bagi pasien dan petugas. UPK melakukan advokasi kepada tenaga kesehatan untuk selalu berkomitmen dalam kelengkapan pengisian *informed consent*. Hal ini sesuai dengan tata nilai UPK yaitu utamakan keselamatan pasien yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kendala yang dihadapi dalam kelengkapan pengisian *informed consent* adalah dokter tidak melengkapi diagnosa pasien dikarenakan adanya antrian panjang untuk pasien yang sedang berobat.

Upaya pemecahan masalah yang sudah dilakukan, yaitu terdapat perawat atau petugas penanggung jawab *Informed Consent* yang

mengecek kelengkapan *informed consent* setiap ada tindakan yang memerlukan *informed consent*.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

2) Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Sesuai Standar

Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar adalah waktu penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas ≤10 menit.

Pengukuran dilakukan dengan formula, jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis sample yang diamati / total sampel rekam medis yang diamati (N tidak kurang dari 100).

Tabel 3.5 Capaian Waktu Penyediaan Rekam Medis Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Sesuai Standar	94%	97%	104%	92%	95%	103%	92%	95%	103%

Berdasarkan Tabel 3.5 terlihat bahwa indikator kinerja waktu penyediaan rekam medis sesuai standar sudah mencapai target. Semenjak pandemi Covid-19, UPK berkomitmen menggunakan rekam medis digital untuk mengurangi penularan virus.

Pada tahun 2024, realisasi waktu penyediaan rekam medis sesuai standar sebesar 97%. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 95%, tahun 2022 realisasi mencapai 95%.

Waktu penyediaan dokumen rekam medis terjadi peningkatan realisasi sebesar 2% dibandingkan tahun 2023. Walaupun terdapat kendala terkait dengan perpindahan sistem informasi dari SIMKLINIK (Sistem Informasi Manajemen Klinik)) ke SIMGos (Sistem Informasi Manajemen Generik Open Source) pada triwulan 2, yang menyebabkan bagian pendaftaran harus cepat beradaptasi dalam

perubahan teknologi baru.

Hal ini, sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan cara *sharing knowledge* antara pranata komputer Unit Pelayanan Kesehatan dengan bagian pendaftaran, dokter maupun perawat yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

3) Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium Ruang Gawat Darurat Sesuai Standar

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar adalah waktu yang dibutuhkan sampai mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium ≤ 140 menit.

Pengukuran dilakukan dengan formula, Jumlah pelayanan Laboratorium dengan waktu tunggu ≤ 140 menit / Jumlah seluruh pelayanan Laboratorium x 100%.

Tabel 3.6 Capaian Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium RGD Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Hasil Pelayanan Lab RGD Sesuai Standar	94%	100%	106%	92%	100%	109%	92%	100%	109%

Berdasarkan Tabel 3.6, terlihat bahwa indikator kinerja waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium RGD sesuai standar tahun 2024 sudah mencapai target dengan realisasi 100%. Hal ini sama dengan capaian pada tahun 2023 dan tahun 2022 realisasi mencapai 100%.

Tidak ada kendala pada waktu hasil pelayanan lab RGD sesuai standar. Sehingga, tidak terdapat upaya pemecahan masalah. Unit Pelayanan Kesehatan tetap berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan untuk mencapai target indikator kinerja.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

4) Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar

Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar adalah waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep sampai mendapatkan obat ≤ 30 menit. Pengukuran dilakukan dengan formula, jumlah pelayanan obat dengan waktu tunggu ≤ 30 menit/ jumlah seluruh pelayanan obat x 100%.

Tabel 3.7 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar	90%	98%	109%	87%	98%	113%	85%	97%	114%

Berdasarkan table 3.7, terlihat bahwa indikator kinerja waktu tunggu hasil pelayanan obat sesuai standar tahun 2024 sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 98%. Pada tahun 2023 realisasi 98% dan tahun 2022 realisasi 97%.

Masa pandemi Covid-19 memaksa UPK untuk komitmen merubah pelayanan resep konvensional menjadi resep digital. Hal ini dilakukan untuk mengurangi media penularan covid melalui kertas resep, yang juga dapat mempersingkat waktu tunggu pelayanan obat.

Tidak ada kendala pada waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar. Sehingga, tidak terdapat upaya pemecahan masalah. Unit Pelayanan Kesehatan tetap berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan untuk mencapai terget indikator kinerja.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

5) Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar adalah waktu tunggu pasien dari pendaftaran sampai mendapatkan pelayanan oleh dokter/dokter gigi/dokter spesialis ≤ 60 menit. Pengukuran dilakukan dengan formula, jumlah pelayanan rawat jalan dengan waktu tunggu ≤ 60 menit / jumlah seluruh pelayanan rawat jalan x 100%.

Tabel 3.8 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar	90%	99%	110%	87%	98%	113%	85%	97%	114%

Berdasarkan table 3.8, terlihat bahwa indikator kinerja waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar tahun 2024 sudah mencapai target dengan realisasi 99%. Hal ini terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2022 dan tahun 2021. Tahun 2023 realisasi waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar 98%, sedangkan tahun 2022 realisasi 97%.

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan, sudah mencapai target. Perhitungan diatas adalah waktu tunggu pasien mulai mendaftar sampai dengan mendapatkan pelayanan dokter umum/dokter gigi. Pasien masih dapat melanjutkan pelayanan lanjutan seperti rujukan poli spesialis, tindakan, dan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi sampai dengan pasien menerima obat dari farmasi.

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar terjadi peningkatan realisasi sebesar 1% dibandingkan tahun 2023. Walaupun terdapat kendala terkait dengan perpindahan sistem informasi dari SIMKLINIK (Sistem Informasi Manajemen Klinik) ke SIMGos (Sistem Informasi Manajemen Generik *Open Source*) pada triwulan 2, yang menyebabkan bagian pendaftaran, dokter, perawat harus cepat beradaptasi dalam perubahan teknologi baru.

Hal ini, sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan cara *sharing knowledge* antara pranata komputer Unit Pelayanan Kesehatan dengan bagian pendaftaran, dokter maupun perawat yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

c. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang ketiga yaitu terwujudnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut.

1) Terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan bagi pegawai Kemenkes

Kelas Edukasi Kesehatan merupakan bentuk partisipasi Unit Pelayanan Kesehatan untuk menjalankan program promosi kesehatan terutama bagi pegawai Kemenkes. Pada tahun 2023, meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung, kondisi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan dengan tahun 2021. Oleh karena itu, Kelas Edukasi Kesehatan dilaksanakan dengan pendekatan *hybrid*.

Pada tahun 2024, Kelas Edukasi Kesehatan dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya kondisi darurat kesehatan seperti pandemi atau bencana lainnya. Kegiatan ini akan mengedepankan model *hybrid* yang sudah terbukti efektif, dengan peserta yang hadir secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi Zoom dan pemanfaatan pembelajaran digital dari Kementerian Kesehatan

Target Kelas Edukasi Kesehatan pada tahun 2024 adalah terlaksana sebanyak 12 kali dalam setahun. Pencapaian atas indikator terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Kelas Edukasi Kesehatan bagi Pegawai Kemenkes

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan bagi Pegawai Kemenkes	98%	100%	102%	95%	100%	105%	95%	100%	105%

Pada tabel 3.9 menunjukkan bahwa indikator terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan bagi pegawai Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 ini realisasi yang dicapai 100% dengan capaian sebesar 102% dari target 98% yang ingin dicapai, pada tahun 2023 realisasi 100% dengan capaian 105% dari target sebesar 95%, pada tahun 2022 realisasi 100% dengan capaian 105% dari target sebesar 95%. Capaian ini sudah melebihi target yang telah ditentukan.

Kelas Edukasi ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga kesehatan maupun masyarakat umum dalam mengelola pelayanan kesehatan agar sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Terdapat kendala terkait dengan tidak dapat dilaksanakan kelas edukasi setiap sebulan sekali. Dikarenakan narasumber sulit di hubungi, terdapat jadwal pelayanan prolanis serta vaksin hepatitis dan influenza bagi pegawai. Sehingga, sulit untuk menentukan jadwal pelaksanaan kelas edukasi per bulan.

Dilakakukan upaya pemecahan masalah dengan rapat koordinasi dengan panitia kelas edukasi terkait dengan pelaksanaan, tema, dan narasumber kelas edukasi sebelum diselenggarakan kelas edukasi.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

Berikut daftar pelaksanaan Kelas Edukasi Kesehatan bagi pegawai Kemenkes tahun 2024:

Tabel 3.10 Daftar Pelaksanaan Kelas Edukasi

No	Tanggal	Tema	Narasumber	Moderator
1	7 March 2024	Kesehatan dan Keselamatan Kerja : Hak atau Kewajiban Pekerja?	Dr. Robiana Modjo, SKM, M.Kes	Faya Rahmanda Oktaviola Putri, SKM
			Dr. dr. Ramzi Amin,Sp.M, Subsp.VR	
2	21 March 2024	Penderita Penyakit Maag Aman Berpuasa, Mitos atau Fakta?	dr. Saskia Aziza Nursyirwan, Sp.PD - KGEH	Balqis Muharamy, A.Md.Gz
			Yudhi Adrianto, S.Gz, SE, MKM, AIFO	

No	Tanggal	Tema	Narasumber	Moderator
3	13 June 2024	Lansia Produktif : Lansia Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat	dr. Arundhati Nugrahaning Adji, Sp.KJ (K) dr. Wawan Budisusilo, Sp.K.O	Fany Triany, S.ikom
4	4 July 2024	Arthritis Autoimun & Psoriasis : harus pasrah atau marah?!	dr. Johanda Damanik, Sp.PD dr. Mardiaty Ganjardani, Sp. DVE	dr. Khairani Ramadhani
5	31 July 2024	Sudahkah Anak Kita Mendapatkan Hak Kesehatannya?!	dr. Cahya Dewi Satria, Sp. A(K) Prof. Dr. Nurussakinah Daulany, M.Psi, Psikolog	Fenny Alvionita, S.Keb, Bd.
6	15 August 2024	Dukung Pemberian ASI Eksklusif Untuk Wujudkan Generasi Produktif	Dr. dr. Wiryani Pambudi, Sp. A, IBCLC dr. Astri Pramanni, IBCLC	Fenny Alvionita, S.Keb, Bd.
7	29 August 2024	Buang Stigma Negatif dengan pahami masalah infertilitas	Hartanto Bayuaji, MD, Ph.D Prof. Silvia Werdhy Lestari, MD, MS, PhD, Sp.And	dr. Indah Pratiwi
8	12 September 2024	Fenomena Cuci Darah pada Anak dan Dewasa	Dr. dr. Eka Laksmi Hidayati, Sp.A(K) Dr. dr. Wachid Putranto, Sp.PD-KGH, FINASIM	dr. Khairani Ramadhani
9	26 September 2024	Rahasia Senyum Berkilau : Panduan Praktis Gigi Sehat & Kuat	drg. Annisa Sabhrina Dr. drg. Rina Permatasari, Sp.KG,.	drg. Irawan Soedino
10	17 October 2024	Yuk, Jaga Sendi, Hidup Aktif dan Bebas Nyeri	Dr. dr. Rudi Hidayat, Sp.PD, K-R Muhammad Irfan S.Ft, SKM, M.Fis	Asti Safitri, A.Md, Kes
11	28 November 2024	Bahan Aktif yang berkualitas : Kunci Skincare yang aman	Dr. dr. Dhelya Widasmara, Sp.D.V.E, Subsp. D.T, FINSADV, FAADV Apt, Dra. Shelly Taurhesia, PhD, F.A.C.P	Nur Chasanah, S.Farm, Apt,.
12	5 December 2024	Kualitas Hidup Lebih Baik Berkat Manajemen Gula Darah	dr. Khomimah, Sp.PD - KEMD, FINASIM Herlina, S.Gz, RD	Balqis Muharamy, A.Md, GZ



Gambar 3.2 Kelas Edukasi

2) Pelatihan Bagi Pegawai UPK

Implementasi indikator ini adalah memberikan kesempatan kepada pegawai Unit Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan keterampilan sesuai bidang profesinya agar selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Peningkatan kapasitas telah diselenggarakan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan. Salah satu pelatihan yang diadakan untuk seluruh pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yaitu berupa Peningkatan Kapasitas Pegawai Dalam Pelayanan prima dan juga dari kelas edukasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Kesehatan setiap sebulan sekali selama tahun 2024 dan juga pelatihan individu masing-masing pegawai.

Tabel 3.11 Pelatihan Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

No.	Nama	Kelas Edukasi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelayanan Prima	Pelatihan Individu
1	Indri Rooslamati, M.Sc., Apt	✓	✓	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) Untuk Umum (20jpl)
2	Hesti Kurniasih, S.E.	✓	✓	Decision Making and Problem Solving (23jpl) Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan (38jpl)
3	dr. Betrizia, SpJP	✓	✓	18th Ina SH Hypertension 2024 (16jpl) Practical implementation of Indonesian Heart Failure Guidelines (6jpl)
4	drg. Irawan Soediono	✓	✓	Heading into a new era of sustainable dentistry (6jpl) webinar approaches of nutrition, oral health and platelet rich plasma innovation for improving quality of life related to diseases (6jpl)
5	dr. Sri Mulyani, SpP	✓	✓	Workshop Orientasi Tahap 1 Program WLC (16jpl)
6	dr. Khairunnisa	✓	✓	Webinar Pulse Check
7	dr. Sumita	✓	✓	Webinar Pulse Check
8	drg. Surnetty Aqwari	✓	✓	Practical guidelines for general practitioner in endodontic treatment Webinar Pulse Check

No.	Nama	Kelas Edukasi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelayanan Prima	Pelatihan Individu
9	drg. Tuti Elvira Nancy	✓	✓	Webinar Pulse Check
				Heading into a new era of sustainable dentistry (6jpl)
				webinar approaches of nutrition, oral health and platelet rich plasma innovation for improving quality of life related to diseases (6jpl)
10	Mika Susianti, A.Md.Kes	✓	✓	Webinar BDI Emergency Nursing Care (6jpl)
11	Evi Wahyuni, A.Md.Kes	✓	✓	Webinar Melalui Semangat Mohuyula, Kita Wujudkan Transformasi SDM Terapis Gigi Dan Mulut Dalam Mencapai Tujuan Keprofesian Yang Amanah Profesional Dan Manfaat
12	Nurasiah, SKM	✓	✓	Melakukan Pengkajian pada Pasien atau Klien di Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (Terapis Gigi dan Mulut)
13	dr. Khairani Ramadhani	✓	✓	ATLS (3 hari)
14	Yuni Asri Sembiring, Am.Ak			Pelatihan Penanggulang TBC Bagi Tenaga ATLM di Fasyankes (31jpl)
15	Nurul Ayyumi, A.Md.Rad	✓	✓	Teknologi Kedokteran Nuklir Update (Radiografer)
16	Indah Stefiastuti Rahayu, S.AP, M.Tr.A.P.	✓	✓	Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran
17	Lestari, A.Md.Kep	✓	✓	Tatalaksana Keperawatan Jiwa Bagi Perawat (4jpl)
				Emergency Nursing Care Update (6jpl)
				Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di kamar Bedah, ICU dan Hemodialisa (6jpl)
				The Holistic Approach to Diabetic Wound (6jpl)
18	Nur Chasanah, S.Farm Apt.	✓	✓	PIT IAI 2024 Synergizing Global Innovations: Empowering Pharmacy for Sustainable Global Health Solutions (12jpl)
19	dr. Indah Pratiwi	✓	✓	Copy of Simulasi MOOC Pelatihan Manajemen Alur Pelayanan (Care Pathway) Bagi Dokter dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (21jpl)
20	Alfi Shariati, S.A.P	✓	✓	Pelatihan teknis jabfung kepegawaian (55jpl)
				Webinar Sosialisasi Pengembangan Kompetensi ASN (2jpl)

No.	Nama	Kelas Edukasi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelayanan Prima	Pelatihan Individu
21	Tri Tungga Dewi Kusumawati, AMF	✓	✓	Manajemen Tanggap Darurat Bencana Fisioterapis
22	Ahmad Fauzan, A.Md	✓	✓	Peningkatan Kompetensi Komunikasi Antar Pribadi pada Tenaga Kesehatan
24	Shinta Indah Pratiwi, A.Md.Kep	✓	✓	Seminar manajemen bencana dan implementasi trauma healing pada ptsd bagi tenaga kesehatan
25	Citra Sri Martani, Am.Ak	✓	✓	Penanggulangan Tuberkulosis(TBC) bagi Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta (31jpl)
26	Erni Novita Sari, SKM	✓	✓	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) (20jpl) E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (13jpl)
27	Wina Happy Lucky, S.E.	✓	✓	Pelatihan RKAKL
28	Indra Mustholih, S.Kom	✓	✓	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian (120jpl)
29	Anisa Dwi Silvia Fisudurini, Am.Ak	✓	✓	Pemeriksaan mikrobiologi analisa pemeriksaan cairan tubuh dalam menegakan diagnosa tuberkulosis_dpc patelki cirebon
30	Eza Pramedia, A.Md.Kep	✓	✓	Seminar manajemen bencana dan implementasi trauma healing pada ptsd bagi tenaga kesehatan
31	Evi Wulandari, A.Md.Kep	✓	✓	Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) bagi Perawat tahun 2024 Angkatan 5 (60jpl)
32	Mohammad Alif Nur Fathoni, A.Md.Rad	✓	✓	Teknologi Kedokteran Nuklir Update (Radiografer)
33	Yudi Dharmawan, A.Md.KG	✓	✓	1. Pengantar PIPK (15jpl) 2. Pelatihan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut (50jpl) 3. Peran KTKI dalam profesi tenaga kesehatan untuk mendukung transformasi kesehatan (5jpl)
34	Fissilmi Kaaffah, A.Md.	✓	✓	Pengolahan Informasi Rekam Medis
35	Balqis Muharamy, A.Md.Gz	✓	✓	Workshop Instrumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Nama	Kelas Edukasi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelayanan Prima	Pelatihan Individu
36	Benita Puspita Sari, SKM	✓	✓	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) (20jpl)
				E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (13jpl)
37	Fany Triany, S.ikom	✓	✓	Workshop Kehumasan Bidang Pelayanan Kesehatan Jakarta, 20-21 maret 2024
				Webinar PPPK Sesi II dan III Transformasi Sistem Kesehatan dan Manajemen Kinerja
38	Mutia Karlina, S.Farm, Apt.	✓	✓	-
39	Faya Rahmanda Oktaviola Putri	✓	✓	Pengelolaan Limbah B3 (2jpl)
40	Septian Edi Prianto	✓	✓	Pelatihan Driver Ambulance (Safe Diving)
41	Fenny Alvionita, S.Keb, Bd.	✓	✓	-
42	Indri Yunita, S.E.	✓	✓	-
42	Roy Kristiyo, S.E	✓	✓	Pelatihan RKAKL
43	Ramadhani Nurfathur Rahman	✓	✓	-
44	Mukhlis, S.Kom	✓	✓	-
45	Akhmad Khaeroni	✓	✓	-
46	Effendi	✓	✓	-
47	Latifah	✓	✓	-
48	Miftah Farid	✓	✓	-
49	Tyas Tasya	✓	✓	-
50	Saiful Anwar	✓	✓	-
51	Asti Safitria	✓	✓	-

Pelatihan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan ialah pegawai UPK yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 100%. Berikut pencapaian atas indikator pelatihan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan:

Tabel 3.12 Capaian Pelatihan Bagi Pegawai

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelatihan bagi Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan	95%	100%	105%	90%	98%	108%	87%	100%	115%

Berdasarkan tabel 3.12, menunjukkan bahwa indikator terlaksananya pelatihan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 ini realisasi yang dicapai sebesar 100% dari target 95% yang ingin dicapai. Dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022, terjadi kenaikan realisasi.

Terdapat kendala terkait dengan tidak ada anggaran untuk pelatihan individu sehingga dilakukan pemecahan masalah dengan mendorong pegawai Unit Pelayanan Kesehatan mengikuti pelatihan tidak berbayar baik secara luring maupun daring yang mendapatkan sertifikat dan mencantumkan jam Pelajaran dalam sertifikat.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

d. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang keempat yaitu terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana. Sasaran ini memiliki satu indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Pada sasaran strategis terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana adalah terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan.

Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur dan/atau bahan ukur. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015, kalibrasi alat kesehatan harus dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam setahun. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan oleh alat kesehatan tersebut akurat dan konsisten jika dibandingkan dengan standar ukur nasional ataupun internasional.

Persentase jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi adalah jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh alat kesehatan yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan dikali 100%.

Tabel 3. 13 Capaian Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tabel 3.13, Menunjukkan bahwa pada tahun 2024, indikator terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan mencapai target yaitu 100%, sama seperti di tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan semua alat kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan sudah dikalibrasi dan laik digunakan. Tidak ada kendala untuk kalibrasi alat-alat Kesehatan. UPK tetap melakukan kalibrasi 100% di tahun 2025.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

e. Terwujudnya Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Integrasi

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang kelima yaitu terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi integrasi. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan waktu tunggu pelayanan kesehatan, unit pelayanan kesehatan memiliki aplikasi SIMKLINIK (Sistem Informasi Manajemen Klinik).

Tabel 3.14. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan
1	Penambahan kolom "Pemeriksaan Fisik" pada laporan kunjungan pasien klinik umum	Selesai
2	Penambahan kolom "advice" pada Laporan Kunjungan Pasien Klinik Umum	Selesai
3	Penambahan kolom "Tindakan" pada laporan kunjungan pasien klinik umum	Selesai
4	Optimasi kode pada laporan kunjungan pasien laboratorium karena tidak muncul hasilnya	Selesai

5	Pengiriman tabel database daftar kode dokter untuk integrasi LIS	Selesai
6	Perbaikan bug tidak bisa input obat pada saat pasien Klinik Gigi Pratama dirujuk	Selesai
7	Koordinasi integrasi SIMKLINIK dan LIS	Selesai
8	Backup Database	Selesai
9	Backup Script	Selesai
10	Laporan dokumen simklinik	Selesai
11	Integrasi dengan SatuSehat	Selesai
12	Integrasi dengan BPJS Kesehatan	Selesai

Tabel 3. 15 Capaian Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Adanya Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi	95%	100%	105%	90%	92%	102%	87%	100%	115%

Pada tabel 3.15 menunjukkan bahwa indikator terlaksananya terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi tahun 2024 ini realisasi 100%, dibandingkan tahun 2023 yang hanya realisasi 92%. Terjadi peningkatan capaian dibandingkan tahun 2023 dikarenakan sistem informasi UPK sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan (*P-Care* BPJS kesehatan).

Kendala terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi adalah kolaborasi dengan penyedia untuk prosedur yang ada di BPJS dengan sistem informasi yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan.

Upaya yang dilakukan dalam pemecahan masalah tersebut adalah menghubungi pihak BPJS untuk melakukan integrasi ke sistem informasi Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

f. Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang keenam yaitu terwujudnya tata kelola Unit Pelayanan Kesehatan dengan baik. Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator realisasi anggaran dan laporan keuangan tepat waktu.

1) Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran

Uraian Belanja	2024			2023			2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1. Belanja Pegawai	6.802.984.000	6.551.127.718	96,30%	6.390.739.000	6.104.310.750	95,52%	7.128.873.000	6.481.388.179	90,92%
2. Belanja Barang	6.916.369.000	6.842.534.130	98,98%	7.843.357.000	7.687.826.955	98,02%	8.198.036.000	8.010.276.804	97,71%
3. Belanja Modal	2.660.052.000	2.659.646.000	99,98%	331.470.000	331.450.000	99,99%	1.218.418.000	1.209.517.759	99,27%
Jumlah Belanja	16.379.405.000	16.053.307.848	98,01%	14.565.566.000	14.123.587.705	97%	16.545.327.000	15.701.182.742	94,90%

Pada tabel 3.16 menunjukkan bahwa indikator terlaksananya terwujudnya anggaran unit pelayanan kesehatan tahun 2024 ini realisasi yang dicapai 16.053.307.848 (98,01%) dari target 95% yang ingin dicapai. Pada tahun 2023, realisasi yang dicapai sebesar 14.123.587.705 (97%) dari target 93% yang ingin dicapai dan tahun 2022, realisasi yang dicapai sebesar 15.701.182.742 (94.90%) dari target 90% yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan setiap tahun.

Pada indikator kinerja realisasi anggaran terdapat kendala masih banyak kegiatan yang harus direalisasikan pada akhir tahun. Sehingga, menyebabkan penumpukan pekerjaan bendahara untuk proses pembayaran. Hal ini sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan menghimbau tim pengadaan untuk batas waktu pembelian barang pada akhir bulan november.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

2) Laporan Keuangan Tepat Waktu

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yaitu terwujudnya laporan keuangan tepat waktu. Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator realisasi laporan keuangan tepat waktu

Tabel 3. 17 Capaian Indikator Laporan Keuangan tepat waktu

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Laporan keuangan tepat waktu	95%	100%	105%	93%	100%	107%	93%	100%	107%

Pada tabel 3.17 menunjukkan bahwa indikator laporan keuangan Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2024 sudah mencapai target 95% dan di tahun 2023 dan tahun 2022 mencapai target 93%. Tidak ada kendala terkait laporan keuangan tepat waktu. Pelaporan keuangan tepat waktu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

g. Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan

1) Presentase Realisasi Target Pendapatan PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara (PP nomor 9 tahun 2020).

Presentase realisasi target pendapat PNB Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI adalah realisasi pendapatan PNB dari pendapatan layanan fasilitas kesehatan dan pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pelayanan kesehatan Non BPJS. Target Pendapatan PNB Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut :

Tabel 3.18 Target Pendapatan PNB

No	Bulan	Pendapatan PNB	Realisasi PNB Bulan Berjalan	Target PNB	Realisasi
1	Januari	51.317.332	51.317.332	449.078.000	11,43%
2	Februari	50.418.370	101.735.702	449.078.000	22,65%
3	Maret	51.635.773	153.371.475	449.078.000	34,15%
4	April	51.114.283	204.485.758	449.078.000	45,53%
5	Mei	53.987.592	258.473.350	449.078.000	57,56%
6	Juni	55.008.247	313.481.597	449.078.000	69,81%
7	Juli	56.678.928	370.160.525	449.078.000	82,43%
8	Agustus	63.202.188	433.362.713	449.078.000	96,50%
9	September	57.210.972	490.573.685	449.078.000	109,24%
10	Oktober	58.222.451	548.796.136	449.078.000	122,21%
11	November	52.536.166	601.332.302	449.078.000	133,90%
12	Desember	59.140.869	660.473.171	449.078.000	147,07%

Pencapaian indikator kinerja utama terkait presentase realisasi target pendapatan PNB, sebagai berikut :

Tabel 3.19 Realisasi Target Pendapatan PNB

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Target Pendapatan PNB	> 90%	147%	163%	95%	146%	154%	-	-	-

Pada tabel 3.19 menunjukkan bahwa indikator realisasi target pendapatan PNB tahun 2024 melebihi target lebih dari 90% dengan realisasi 147% dan capaian 163%. Capaian tahun 2024 mengalami kenaikan 1% dibandingkan tahun 2023. Tidak terdapat kendala pada realisasi target pendapatan PNB.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

2) Presentase Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah Murni

Presentase realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni adalah Realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni. Pencapaian indikator kinerja utama terkait presentase realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni, sebagai berikut :

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah Murni

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah Murni	90%	97,98%	101%	97%	97%	100%	-	-	-

Pada tabel 3.20 menunjukkan bahwa indikator realisasi anggaran bersumber rupiah murni tahun 2024 sudah mencapai target 95% dengan realisasi 97,98%. Capaian tahun 2024 mengalami kenaikan 0,98% dibandingkan tahun 2023. terdapat kendala terkait anggaran sewa kendaraan. Hal ini sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan buka blokir setelah di reviu ulang oleh DJA dengan menyampaikan data dukung RKBMN dan Perbandingan *e-katalog*.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

3) Presentase Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah PNBP

Presentase realisasi anggaran bersumber Rupiah PNBP adalah Realisasi anggaran bersumber Rupiah PNBP. Pencapaian indikator kinerja utama terkait presentase realisasi anggaran bersumber Rupiah PNBP, sebagai berikut :

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah PNB

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Anggaran Bersumber PNB	95%	99,52%	105%	95%	98,77%	104%	-	-	-

Pada tabel 3.21 menunjukkan bahwa indikator realisasi anggaran bersumber rupiah PNB tahun 2024 sudah mencapai target 95% dengan realisasi 99,52% dan capaian 105%. Capaian tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0.75% dibanding tahun 2023. terdapat kendala terkait anggaran pembelian obat-obatan reagen dan BMHP yang di blokir oleh DJA. Hal ini sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan buka blokir setelah di reviu ulang oleh DJA dengan menyampaikan data dukung dan Perbandingan *e-katalog*, daftar *stock opname* obat-obatan reagen dan BMHP.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

2. Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.22 Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Program/Kegiatan	No Indikator	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2024	Target 2025
1	Terwujudnya Kepuasan Stakeholder	1	Tingkat kepuasan pelanggan	98%	95%	-
		2	Komplain yang ditindaklanjuti	100%	95%	100%
2	Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas	3	Kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	100%	100%	100%
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar	97%	94%	-
		5	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ruang gawat darurat sesuai standar	100%	94%	-

No	Sasaran Program/Kegiatan	No Indikator	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2024	Target 2025
		6	Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar	96%	90%	93%
		7	Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar	99%	90%	93%
3	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM	8	Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai Kemenkes	100%	98%	6 Kali
		9	Presentase pelatihan bagi pegawai UPK	100%	95%	95%
4	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana	10	Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan	100%	100%	100%
5	Terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi	11	Adanya aplikasi sitem informasi terintegrasi	100%	95%	-
6	Terwujudnya akuntabilitas anggaran	12	Realisasi anggaran	98%	95%	-
		13	Laporan keuangan tepat waktu	100%	95%	-
7	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	14	Presentase Realisasi Target Pendapatan PNB	147,07%	>90%	-
		15	Presentase Realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	97,98%	90%	90%
		16	Presentase Realisasi Anggaran bersumber Rupiah PNB	99,52%	95%	95%

- a. Berdasarkan indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan, realisasi 2024 mencapai 98% dengan target tahun 2024 94%. Pada tahun 2025 tidak masuk kedalam Indikator Kinerja karena terjadi perubahan sasaran program dan perhitungan pada tingkat kepuasan pelanggan.
- b. Berdasarkan indikator kinerja komplain yang ditindaklanjuti, realisasi 2024 mencapai 100% dengan target tahun 2024 95%. Sedangkan, target 2025 komplain yang ditindaklanjuti 100%. Diharapkan semua komplain dapat diselesaikan untuk perbaikan Unit Pelayanan Kesehatan.

- c. Berdasarkan indikator kinerja kelengkapan pengisian *informed consent*, realisasi 2024 mencapai 100% dengan target tahun 2024 100%. Sedangkan, target 2025 kelengkapan pengisian informed consent 100%. Diharapkan terus mempertahankan realisasi yang dicapai.
- d. Berdasarkan indikator kinerja waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar, realisasi 2024 mencapai 97% dengan target tahun 2024 94%. Pada tahun 2025 tidak masuk kedalam Indikator Kinerja karena terjadi perubahan sasaran program dan IKU tersebut dirubah menjadi “Kelengkapan Pengisian Koding Diagnosa Rawat Jalan”. Diharapkan dengan perubahan IKU tersebut dapat dilakukan diagnosa yang tepat atas penyakit pasien.
- e. Berdasarkan indikator kinerja waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar, realisasi 2024 mencapai 100% dengan target tahun 2024 94%. Sedangkan, target 2025 tidak masuk kedalam Indikator Kinerja karena terjadi perubahan sasaran program dan IKU tersebut dirubah menjadi “Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium”. Diharapkan dengan perubahan IKU tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan Unit Pelayanan Kesehatan.
- f. Berdasarkan indikator kinerja waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar, realisasi 2024 mencapai 96% dengan target tahun 2024 90%. Sedangkan, target 2025 waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar 93%. Diharapkan terus mempertahankan realisasi yang dicapai.
- g. Berdasarkan indikator kinerja waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar, realisasi 2024 mencapai 99% dengan target tahun 2024 90%. Sedangkan, target 2025 waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar sesuai standar 93%. Diharapkan terus mempertahankan realisasi yang dicapai.
- h. Berdasarkan indikator kelas edukasi kesehatan bagi pegawai kemenkes, realisasi 2024 mencapai 100% dengan target tahun 2024 98%. Sedangkan, target 2025 terjadi perubahan hitungan pada kelas edukasi, kelas edukasi akan dilaksanakan 6x dalam 1 tahun. Diharapkan dapat mencapai pelaksanaan kelas edukasi.
- i. Berdasarkan indikator pelatihan bagi pegawai UPK, realisasi 2024 mencapai 100% dengan target tahun 2024 95%. Sedangkan, target 2025 pelatihan bagi

pegawai UPK sesuai standar 95%. Diharapkan terus mempertahankan realisasi yang dicapai.

- j. Berdasarkan indikator terlaksananya kalibrasi, realisasi 2024 mencapai 100% dengan target tahun 2024 100%. Sedangkan, target 2025 terlaksananya kalibrasi sesuai standar 100%. Diharapkan terus mempertahankan realisasi yang dicapai.
- k. Berdasarkan indikator adanya aplikasi sistem informasi terintegrasi, realisasi 2024 mencapai 100% dengan target tahun 2024 95%. Sedangkan, target 2025 terdapat perubahan IKU menjadi “Presentase Implementasi Rekam Medis Elektronik Terintegrasi Pada Seluruh Layanan”. Diharapkan pengembangan aplikasi yang terintegrasi dapat memudahkan pelayanan.
- l. Berdasarkan indikator realisasi anggaran, realisasi 2024 mencapai 98% dengan target tahun 2024 95%. Sedangkan, target 2025 terjadi perubahan sasaran strategis sehingga realisasi anggaran diperinci menjadi RM dan PNBP.
- m. Berdasarkan indikator laporan keuangan tepat waktu, realisasi 2024 mencapai 100% dengan target tahun 2024 100%. Sedangkan, target 2025 terjadi perubahan sasaran strategis sehingga tidak digunakan indikator laporan keuangan tepat waktu.
- n. Berdasarkan indikator presentase realisasi target pendapatan PNBP, realisasi 2024 mencapai 147.07% dengan target tahun 2024 >90%. Sedangkan, target 2025 terjadi perubahan sasaran strategis sehingga dirubah menjadi “Total Pendapatan PNBP”.
- o. Berdasarkan indikator presentase realisasi anggaran bersumber rupiah murni, realisasi 2024 mencapai 97.98% dengan target tahun 2024 90%. Sedangkan, target 2025 90%. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja Unit Pelayanan Kesehatan.
- p. Berdasarkan indikator presentase realisasi anggaran bersumber rupiah PNBP, realisasi 2024 mencapai 99.52% dengan target tahun 2024 95%. Sedangkan, target 2025 95%. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja Unit Pelayanan Kesehatan.

3. Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan

UPK melakukan pelayanan kesehatan rutin dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan medis
- 2) Pelayanan gawat darurat
- 3) Pelayanan laboratorium
- 4) Pelayanan radiologi
- 5) Pelayanan fisioterapi
- 6) Pelayanan Gizi
- 7) Pelayanan farmasi

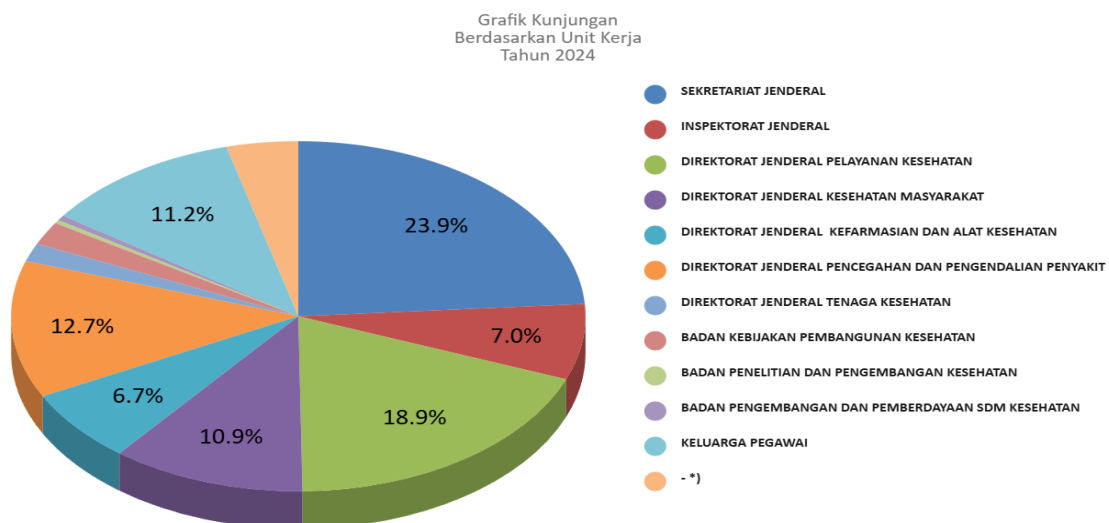
Peran dan fungsi UPK yang paling pokok adalah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Kementerian Kesehatan dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif melalui berbagai layanan rutin. Pelayanan medis menjadi ujung tombak dalam memberikan pemeriksaan kesehatan umum, penanganan penyakit akut maupun kronis, serta rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut. Selain itu, UPK juga menyelenggarakan pelayanan gawat darurat yang berfokus pada penanganan cepat dan tepat terhadap kondisi medis kritis dengan didukung oleh peralatan medis darurat dan tenaga medis terlatih. Untuk mendukung diagnosis yang akurat, tersedia pelayanan laboratorium yang meliputi pemeriksaan darah, urine, dan sampel lainnya, serta pelayanan radiologi dengan fasilitas rontgen, USG, dan pencitraan medis lainnya. Dalam mendukung proses pemulihan, UPK juga menyediakan pelayanan fisioterapi yang membantu pasien dengan gangguan otot, sendi, dan saraf melalui program rehabilitasi yang terstruktur.

Selain layanan medis, UPK turut memberikan pelayanan gizi yang berfokus pada edukasi dan konsultasi mengenai pola makan sehat, penyusunan program diet, serta penanganan masalah gizi. Pelayanan farmasi juga menjadi bagian integral dalam memastikan ketersediaan obat-obatan yang aman dan efektif, disertai dengan edukasi penggunaan obat yang rasional. Dengan penguatan dan pengembangan berbagai layanan tersebut, UPK berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi

pegawai Kementerian Kesehatan dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, guna mendukung tercapainya derajat kesehatan yang optimal.

Dengan optimalisasi berbagai layanan tersebut, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kementerian Kesehatan berhasil mencatat total kunjungan sebanyak 21.293 pada tahun 2024. Jumlah ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dan kebutuhan terhadap layanan kesehatan yang disediakan oleh UPK, yang tidak hanya melayani pegawai Kementerian Kesehatan tetapi juga masyarakat sekitar. Capaian ini menjadi indikator penting bahwa peran dan fungsi UPK dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas telah berjalan dengan baik, sekaligus mendorong peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

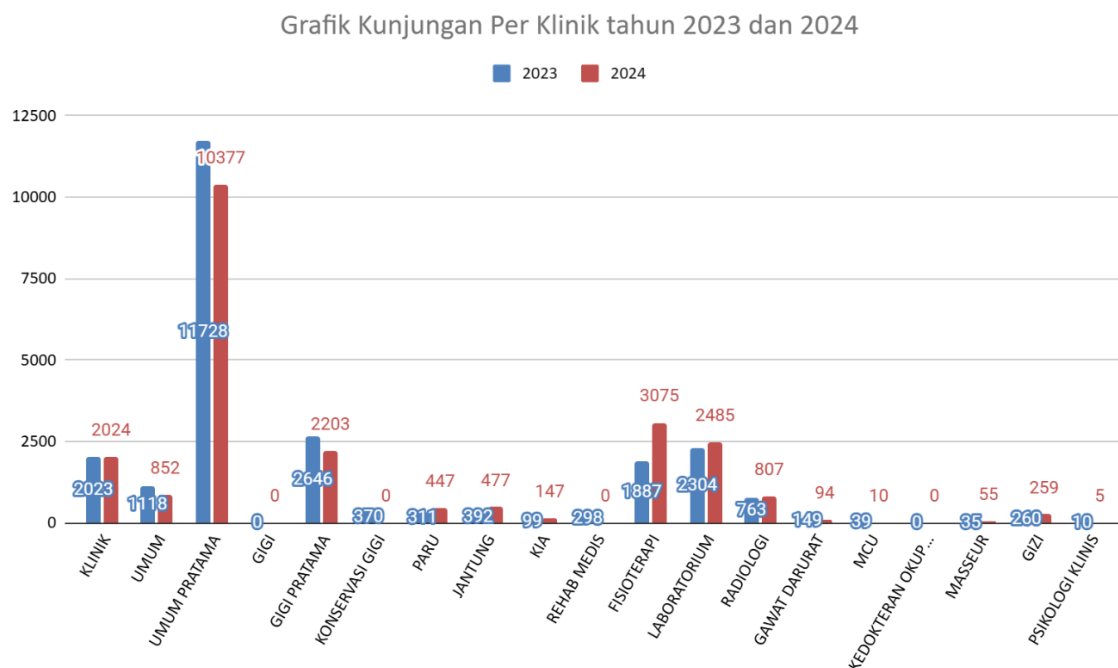
Grafik 3. 2 Kunjungan Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024



Pada Grafik 3.2 menjelaskan bahwa pegawai Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menjadi kelompok yang paling sering mengakses layanan kesehatan rutin di UPK, masing-masing sebesar 23,9% dan 18,9%. Selain itu, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Keluarga Pegawai juga merupakan pengguna layanan yang signifikan, dengan kontribusi masing-masing 12,7% dan 11,2%. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan layanan kesehatan dari unit-unit tersebut.

Selain melayani pegawai struktural, UPK juga memberikan layanan kesehatan kepada kelompok pasien lainnya, termasuk pegawai honorer, petugas kebersihan, penggerak usaha seperti kantin, pegawai bank, serta masyarakat umum. Kelompok ini tergabung dalam kategori lainnya yang turut memberikan kontribusi kunjungan, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Grafik ini mencerminkan keberagaman pengguna layanan yang ditangani oleh UPK, dengan fokus utama tetap pada pegawai internal Kemenkes.

Grafik 3.3 Kunjungan per Poli Tahun 2023 dan 2024



Bersdasarkan Grafik 3.3 Total kunjungan rutin ke berbagai klinik pada tahun 2023 tercatat sebanyak 22.409 kunjungan, sementara pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 21.293 kunjungan. Penurunan sebesar 4.97% ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyesuaian layanan klinik atau perubahan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan tertentu. Beberapa klinik yang mengalami penurunan signifikan antara lain Klinik Umum Pratama yang turun dari 11.728 menjadi 10.377 kunjungan, serta Klinik Gigi Pratama yang turun dari 2.646 menjadi 2.203 kunjungan. Namun, beberapa klinik seperti Fisioterapi justru mengalami peningkatan signifikan dari 1.887 menjadi 3.075 kunjungan, menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan fisik.

Selain itu, beberapa klinik lain juga menunjukkan tren positif, seperti Klinik Laboratorium yang meningkat dari 2.304 menjadi 2.485 kunjungan dan Klinik Radiologi dari 763 menjadi 807 kunjungan. Namun, beberapa layanan seperti Rehabilitasi Medis dan Psikologi Klinis mengalami penurunan atau bahkan tidak menerima kunjungan pada tahun 2024. Perubahan ini dapat mencerminkan pergeseran prioritas masyarakat dalam memilih layanan kesehatan, atau mungkin adanya penyesuaian kebijakan operasional di beberapa klinik. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan total kunjungan, peningkatan di beberapa layanan menunjukkan adanya kebutuhan yang lebih spesifik dan mendalam terhadap layanan kesehatan tertentu.

Pada tahun 2023 kunjungan pasien terbanyak di poli umum pratama.

Tabel 3.23 Jumlah Penyakit Terbanyak Tahun 2024

No	Diagnosa	Jumlah
1	K04.1 - Necrosis of pulp	1698
2	I10 - Essential (primary) hypertension	1505
3	K02.1 - Caries of dentine	1371
4	M79.1 - Myalgia	1142
5	J06.9 - Acute upper respiratory infection, unspecified	1050
6	M54.5 - Low back pain	477
7	R25.2 - Kram dan spasme	405
8	E11.9 - Diabetes mellitus tak tergantung insulin tanpa komplikasi	394
9	K02.1 - Caries of dentine	348

Berdasarkan Tabel 3.23, diketahui bahwa jumlah penyakit terbanyak pada tahun 2024 didominasi oleh masalah kesehatan gigi dan penyakit kronis. Penyakit paling banyak diderita adalah *Necrosis of pulp* (K04.1) dengan 1.698 kasus, diikuti oleh *Essential (primary) hypertension* (I10) sebanyak 1.505 kasus, serta *Caries of dentine* (K02.1) sebanyak 1.371 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan gigi dan hipertensi masih menjadi perhatian utama masyarakat. Selain itu, penyakit seperti *Myalgia* (M79.1) dan *Acute upper respiratory infection, unspecified* (J06.9) juga memiliki jumlah

kasus yang tinggi, masing-masing sebanyak 1.142 dan 1.050 kasus, menandakan tingginya keluhan terkait nyeri otot dan infeksi saluran pernapasan atas.

Di sisi lain, keluhan muskuloskeletal seperti *Low back pain* (M54.5) dengan 477 kasus dan *Kram dan spasme* (R25.2) sebanyak 405 kasus menunjukkan bahwa gangguan otot dan sendi cukup sering dialami. Penyakit kronis seperti *Diabetes mellitus tak tergantung insulin tanpa komplikasi* (E11.9) juga cukup tinggi dengan 394 kasus. Total keseluruhan kasus dari sepuluh penyakit terbanyak ini mencapai 8.690 kasus. Data ini mencerminkan perlunya peningkatan layanan promotif dan preventif, terutama dalam penanganan penyakit tidak menular dan perawatan kesehatan gigi, agar angka kejadian penyakit tersebut dapat ditekan di masa mendatang.

1) Pelayanan Swab Antigen

Pelayanan ini dilakukan untuk tracing, testing dan juga untuk memenuhi perjalanan dinas pegawai.

Tabel 3.24 Kunjungan Swab Antigen

Nama Bulan	Jumlah Peserta	Hasil	
		Negatif	Positif
		Jumlah	Jumlah
Januari	209	202	7
Februari	278	274	4
Maret	223	221	2
April	245	241	4
Mei	125	123	2
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	1	1	0
September	1	1	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0

Nama Bulan	Jumlah Peserta	Hasil	
		Negatif	Positif
		Jumlah	Jumlah
Total	1082	1063	19

Berdasarkan tabel 3.24, total peserta swab antigen bulan Januari-Desember 2022 adalah 1082 orang. Jumlah kunjungan terbanyak pada bulan Februari sebesar 278 orang dengan hasil antigen negatif 274 orang dan hasil positif 4 orang. Peserta paling sedikit pada bulan Juni, Juli, Oktober, November, dan Desember sebanyak 0 orang dengan hasil negatif 0 orang dan hasil positif 0 orang.

Tabel 3.25 Data SWAB Antigen Berdasarkan Unit Kerja

Total Per Unit	Jumlah Peserta	Hasil	
		Negatif	Positif
Sekretariat Jenderal	340	340	6
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	44	43	1
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	288	71	0
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	350	72	4
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	26	25	1
Inspektorat Jenderal	33	8	0
Lain-Lain	2	2	0

Berdasarkan Tabel 3.25 Peserta Swab Antigen terbanyak berasal dari Unit Kerja Sekretariat Jenderal berjumlah 1801. Sedangkan Peserta Swab Antigen dengan hasil Positif terbanyak berasal dari unit Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berjumlah 41 orang.

2) Pelayanan *Ambulance* dan Rujukan Gawat Darurat

Pelayanan *ambulance* dan rujukan dilakukan untuk penanganan kegawatdaruratan dan juga transportasi jenazah. Pelayanan *ambulance* dan rujukan diberikan tidak hanya kepada pegawai, juga

kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Untuk keperluan pelayanan *ambulance* dan rujukan yang terintegrasi dan kompeten, driver *ambulance* diberikan pelatihan *Defensive Driving* dan Bantuan Hidup Dasar. Petugas medis Ruang Gawat Darurat yaitu perawat dan dokter sudah mendapat pelatihan kegawatdaruratan dengan simulasi penanganan kondisi gawat darurat, pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS) untuk perawat dan *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS) dan *Advanced Trauma Life Support* (ATLS) untuk dokter.

3) Kelas Edukasi

Pada Tahun 2024 Kegiatan Kelas Edukasi Kesehatan mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif untuk menjawab tantangan yang masih terkait dengan pandemi COVID-19 dan perubahan pola interaksi di dunia digital. Selain penggunaan aplikasi Zoom untuk kelas daring, kegiatan ini juga akan memanfaatkan Learning Management System (LMS) dari Kementerian Kesehatan untuk memperkaya pengalaman belajar peserta dan memastikan aksesibilitas yang lebih luas terhadap materi edukasi kesehatan.

Melalui LMS ini, peserta yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan tidak hanya dapat mengakses materi edukasi kesehatan secara lebih fleksibel, tetapi juga akan mendapatkan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang diakui Kementerian Kesehatan. Sertifikat SKP ini merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang kesehatan, yang sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan adanya sertifikat SKP, tenaga kesehatan dapat memenuhi tuntutan pengembangan kompetensi profesional mereka, yang merupakan kewajiban dalam proses revalidasi dan peningkatan karier di bidang kesehatan.

a. Pelayanan Vaksinasi Influenza dan Hepatitis B di Unit Pelayanan Kesehatan

Sebagai wujud upaya promotif, di tahun 2024 UPK juga memberikan pelayanan vaksinasi influenza dan hepatitis B kepada pegawai yang membutuhkan. Vaksin influenza diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan virus influenza. Vaksin hepatitis B diberikan sebagai tindak lanjut hasil *medical check-up* pegawai Kementerian Kesehatan yang sebagian dianjurkan untuk mendapatkan vaksin hepatitis B.



Gambar 3.3 Pelayanan Vaksinasi Influenza dan Hepatitis B

Tabel 3.26 Kunjungan Vaksinasi Influenza dan Hepatitis B

Bulan	Vaksin Influenza	Vaksin Hepatitis B
Januari	159	4
Februari	2	11
Maret	0	11
April	0	0
Mei	0	0
Juni	0	23
Juli	102	16
Agustus	0	2
September	0	2
Oktober	0	50
November	0	39
Desember	0	25
Total	263	183

Berdasarkan Tabel 3.26, Jumlah kunjungan peserta vaksin influenza di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah 263 orang dan vaksin hepatitis B sebanyak 183 orang (termasuk kunjungan dosis pertama, kedua, dan ketiga).

C. SUMBER DAYA

Sumber daya di Unit Pelayanan Kesehatan terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, serta sumber daya keuangan. Berikut penjabaran sumber daya yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebanyak 45 orang yang terdiri dari 34 PNS dan 5 PPPK serta 6 tenaga honorer (PPNPN), yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Jenis Sumber Daya Manusia

No	Dokter Spesialis	2024
1	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1
	Spesialis Paru	1
2	Dokter Umum	4
3	Dokter Gigi	3
4	Perawat	5
5	Perawat Gigi	3
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	3
7	Fisioterapis	1
8	Rekam Medik	2
9	Apoteker	1
10	Radiografer	2
11	Administrator Kesehatan	2
12	Nutrisi	1
13	Struktural	2
14	Administrasi	8
15	Tenaga Honorer	6
Jumlah		45

Pada tahun 2024 tepat nya bulan April ada tambahan 3 orang PPPK yaitu 1 Perencana Ahli Pertama, Bidan Ahli Pertama dan Pranata Sumber Daya Manusia Kesehatan. Tenaga Honorer yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan terdiri dari 1 Pembimbing Kesehatan Kerja, 1 Fisioterapis, 1 Apoteker, 1 Arsiparis, 1 Analis Keuangan dan 1 Pengemudi Ambulans.

Tabel 3.28 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah Pegawai	
		N	%	N	%	N	%
1.	SMA	0	0%	0	0%	0	0%
2.	D3	17	44%	1	22%	18	40%
3.	S1/D4	17	42%	5	78%	22	49%
4.	S2/Spesialis	5	14%	0	0%	5	11%
Jumlah		39	100%	9	100%	45	100%

Berdasarkan tabel 3.28 terlihat bahwa sebagian besar pegawai Unit Pelayanan Kesehatan memiliki tingkat pendidikan S1/D4 yaitu sebesar 49%.

Tabel 3.29 SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS		Non PNS		Jumlah Pegawai	
		N	%	N	%	N	%
1.	Laki-laki	7	14%	2	33%	8	18%
2.	Perempuan	32	86%	6	67%	37	82%
Jumlah		39	100%	9	100%	45	100%

Berdasarkan Tabel 3.29 terlihat bahwa sebagian besar pegawai Unit Pelayanan Kesehatan berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 82%.

Tabel 3.30 SDM Berdasarkan Jabatan

No	SDM	Jumlah
1	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3	Administrator Kesehatan Pertama	2
4	Dokter/Dokter Gigi Utama	1
5	Dokter/Dokter Gigi Madya	2
6	Dokter/Dokter Gigi Muda	0
7	Dokter Ahli Pertama	2

No	SDM	Jumlah
8	Perawat/Perawat Gigi Penyelia	1
9	Perawat Mahir	2
10	Perawat/Perawat Gigi Terampil	2
11	Pranata Lab Kesehatan Mahir	2
12	Bidan Ahli Pertama	1
13	Pranata Lab Kesehatan Terampil	1
14	Fisioterapis Mahir	1
15	Rekam Medik Mahir	1
16	Rekam Medik Terampil	1
17	Apoteker Ahli Pertama	1
18	Radiografer Mahir	1
19	Radiografer Terampil	1
20	Nutrisisionis Terampil	1
21	Analisis Sumber Daya Manusia Apartur Ahli Pertama	1
22	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
23	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	1
24	Pranata Humas	1
23	Perencana Ahli Pertama	2
24	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
25	Tenaga Honorer	6
Jumlah		45

Dari tabel 3.30, SDM Unit Pelayanan Kesehatan berdasarkan jabatan Tahun 2024 masih terdapat jabatan yang belum ada di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jabatan yang belum ada dikarenakan belum ada PNS yang menduduki jabatan tersebut sehingga ada beberapa jabatan saat ini diisi oleh tenaga honorer. Jabatan yang belum ada di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah Arsiparis, Analis Keuangan, Pengelola BMN, Analis Kebijakan BMN, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Pengemudi Ambulans.

2. Sarana dan Prasarana

Laporan pengelolaan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Kesehatan selama tahun anggaran 2024 adalah :

i. BMN Intrakomptabel

Posisi Awal (per 1 Januari 2024)	: Rp. 25.235.752.022
Penambahan	: Rp. 2.659.646.000
Pengurangan	: Rp. 2.159.433.848
Posisi Akhir (per 31 Desember 2024)	: Rp. 25.735.964.174

ii. BMN Ekstrakomptabel

Posisi Awal (per 1 Januari 2024)	: Rp. 18.052.865
Penambahan	: Rp. -
Pengurangan	: Rp. -
Posisi Akhir (per 31 Desember 2024)	: Rp. 18.052.865

iii. BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel BMN

Posisi Awal (per 1 Januari 2024)	: Rp. 25.253.804.887
Penambahan	: Rp. 2.659.646.000
Pengurangan	: Rp. 2.159.433.848
Posisi Akhir (per 31 Desember 2024)	: Rp. 25.754.017.039

Tabel 3.31 Belanja Sarana dan Prasarana.

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai
1	Printer	Buah	1	3,441,000
2	P.C Unit	Buah	3	61,755,000
3	Tabir pelindung	Buah	1	22,000,000
4	Kacamata anti radiasi	Buah	1	2,650,000
5	Telephone Mobile	Buah	1	19,000,000
6	Note Book	Buah	1	18,500,000
7	Echo Cardiograph System	Buah	1	2,523,500,000
8	Dehumidifier	Buah	1	3,500,000
9	TLD Badge	Buah	2	5,800,000

3. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2024 Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes memiliki 2 (dua) jenis sumber daya keuangan yakni Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk RM Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes sendiri mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp16.020.143.000,- sedangkan untuk pagu anggaran PNBP sendiri sebesar Rp359.262.000,- sehingga jumlah total pagu anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes sebesar Rp16.379.405.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target pendapatan Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp449.078.000,- secara detail realisasi pendapatan yang diperoleh Unit Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.32 Target dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2023		
	Target	Realisasi Pendapatan	%
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	81.750.000	77.627.000	94,96%
Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	6.000.000	27.888.900	464,82%
Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	361.328.000	554.957.271	153,59%
Jumlah	449.078.000	660.473.171	147,07%

Realisasi pendapatan yang diperoleh Unit Pelayanan Kesehatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp660.473.171,- dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp449.078.000,- dan telah melebihi target pendapatan yakni sebesar 147,07 %.

Namun, pendapatan yang dapat digunakan oleh Unit Pelayanan Kesehatan pada tahun 2024 sesuai nomor S-636/MK.02/2020 tanggal

23 Juli 2020 yakni sebagai berikut :

1. Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan;
2. Pendapatan dari BPJS kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL);
3. Pendapatan dari BPJS kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

b. Realisasi Belanja

Realisasi anggaran belanja Unit Pelayanan Kesehatan terhadap belanja Rupiah Murni (RM) dan belanja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara detail dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.33 Realisasi Belanja TA 2024

No	Sumber Dana	TA 2024		
		Pagu	Realisasi Belanja	Capaian
1	Belanja RM			
	Pegawai	6.802.984.000	6.551.127.718	96,31
	Barang	6.557.107.000	6.485.001.730	98,98
	Modal	2.660.052.000	2.659.646.000	99,98
	Jumlah Belanja RM	14.227.534.000	13.789.726.305	97,98
2	Belanja PNBP			
	Pegawai	0	0	0
	Barang	359.262.000	357.532.400	99,52
	Modal	0	0	0
	Jumlah Belanja PNBP	359.262.000	357.532.400	99,52
Jumlah		14.565.566.000	16.053.307.848	98,01

Berdasarkan tabel 3.33, realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp16.053.307.848,- dimana dapat dijelaskan untuk realisasi belanja Rupiah Murni (RM) adalah sebesar Rp15.695.775.448,- sedangkan realisasi belanja PNBP adalah sebesar Rp357.532.400,-.

Realisasi belanja yang paling rendah untuk tahun 2023 adalah untuk sumber dana rupiah murni (RM) pada realisasi belanja pegawai. Hal ini disebabkan, karena pada tahun 2023 ada beberapa pegawai Unit Pelayanan Kesehatan yang mutasi dan pensiun.

c. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai kinerja. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Unit Pelayanan Kesehatan memiliki 2 (dua) program yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pelayanan Kesehatan dan JKN, dalam pelaksanaan program tersebut ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan efisiensi untuk mendukung kegiatan lainnya. Seperti yang telah ditampilkan pada tabel 3.34 sebagai berikut :

Tabel 3.34 Efisiensi Anggaran TA 2024

No	Semula				Menjadi		
	Kegiatan	Anggaran			Kegiatan	Anggaran	
		Awal	Revisi	Efisiensi		Awal	Anggaran Tambahan Efisiensi
1	Pemeliharaan alat kesehatan	346.317.000	337.001.000	-9.316.000	Pengadaan alkes	25.040.000	9.316.000
2	Perjalanan Dinas	102.467.000	86.220.000	-16.247.000	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.34, dapat dijelaskan efisiensi anggaran yang dilakukan Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan efisiensi pada anggaran pemeliharaan alat kesehatan pada saat ini karena terdapat hal yang prioritas yaitu pengadaan *TLD Badge* untuk petugas radiologi berdasarkan hasil inspeksi Bapeten dimana Klinik harus memiliki cadangan *TLD Badge* yang dapat digunakan saat *TLD badge* sedang dikalibrasi atau rusak. Serta adanya penambahan *dehumidifier* untuk menjaga kelembapan ruang radiologi;
2. Dilakukan efisiensi pada perjalanan dinas terkait dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Hal langkah-langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

BAB IV

PENUTUP

Unit Pelayanan Kesehatan telah merealisasikan kinerja yang telah tertuang di dalam Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan selama kurun waktu satu tahun.

Indikator Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan secara umum **berhasil** mencapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala UPK dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Pencapaian pada tahun 2024 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan di tahun berikutnya lebih efektif dan efisien. Beberapa kendala yang di hadapi selama tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Pada indikator survey kepuasan terdapat kritik terkait pendaftaran untuk pelayanan poli gigi yang susah dan berbelit-belit. Pemecahan masalah dari kritik dari pelayanan poli gigi dan mulut sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 1 pada tanggal 9 Agustus 2024 hal permohonan mahasiswa jurusan kesehatan gigi untuk dapat melakukan praktek kerja lapangan di UPK Kemenkes dan bersurat kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada tanggal 29 Oktober 2024 hal Permohonan Tenaga Kesehatan di UPK Kemenkes. Pada tahun 2025, mengusulkan formasi CPNS dokter gigi dan perawat gigi. Terdapat kritik terkait kuota rujukan yang lama. Sudah dilakukan sosialisasi alur rujukan di media sosial UPK dan di tayangkan melalui TV LED yang berada di klinik prtama dan utama UPK Kemenkes pada tanggal 15 Juli 2024 dan membuat aplikasi SIPEKAN(Sistem Pengingat Rujukan).
- b. Pada indikator kinerja komplain yang ditindaklanjuti terdapat kendala Keterbatasan Sumber Daya dan komplain yang kompleks atau berulang. Hal ini sudah ditindaklanjuti degan menambah jumlah staf khusus menangani komplain dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani keluhan pelanggan dan komplain yang berulang sudah ditindaklanjuti oleh manajemen dan pimpinan. Untuk tahun 2025, tetap

melakukan pemantauan dan evaluasi komplain dan dilaporkan kepada pimpinan.

- c. Pada indikator kinerja pengisian *informed consent* terdapat kendala terkait dokter tidak melengkapi diagnosa pasien dikarenakan adanya antrian yang panjang, hal ini sudah ditindaklanjuti dengan dibentuknya penanggungjawab *informed consent* yang bertugas untuk mengecek kelengkapan *informed consent*. Pada tahun 2025, tetap dilakukan pengecekan kelengkapan *informed consent* setiap ada tindakan yang memerlukan *informed consent*.
- d. Pada indikator kinerja waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar dan waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar terdapat kendala terkait dengan perpindahan sistem informasi dari SIMKLINIK (sistem informasi manajemen klinik) ke SIMGos (sistem informasi manajemen *generik open source*) pada triwulan II yang menyebabkan bagian pendaftaran, dokter, perawat yang harus cepat beradaptasi dalam perubahan teknologi baru. Hal ini sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan cara *sharring knowledge* antara pranata komputer dengan bagian pendaftaran, dokter, perawat.
- e. Pada indikator pelatihan pegawai terdapat kendala terkait dengan tidak ada anggaran untuk pelatihan individu pegawai Unit Pelayanan Kesehatan, sehingga pegawai harus mencari pelatihan yang bersifat gratis untuk memenuhi pelatihan 20JPL/tahun. Hal ini sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan cara Unit Pelayanan Kesehatan mengadakan kelas edukasi dan pegawai diwajibkan untuk mengikuti pelatihan di LMS (*Learning Management System*). Pada tahun 2025, akan dilaksanakan pelatihan kompetensi bagi pegawai dan tetap mencari pelatihan sesuai kompetensi di LMS (*Learning Management System*). Selain itu, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk pegawai yang belum memenuhi pelatihan 20jpl setiap triwulan.
- f. Pada indikator presentase realisasi anggaran bersumber rupiah murni dan realisasi anggaran bersumber PNBP terdapat kendala terkait anggaran sewa kendaraan dan pembelian obat-obatan reagen dan BMHP yang di blokir oleh DJA. Hal ini sudah dilakukan upaya pemecahan masalah dengan buka blokir setelah di reviu ulang oleh DJA dengan menyampaikan data dukung RKBMN dan Perbandingan *e-katalog*, daftar *stock opname* obat-obatan reagen dan

BMHP. Realisasi anggaran Unit Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.054.049.195 atau 98,1%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan selain merupakan pertanggungjawaban kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan demi peningkatan Unit Pelayanan Kesehatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Pohan, Imbalo S. 2006. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta:EGC

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan*. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang *Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0 (Nol Rupiah) atau (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan*. Jakarta.

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
UNIT PELAYANAN KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Rooslamiati, M.Sc., Apt

Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS
NIP 19710626200031002

Indri Rooslamiati, M.Sc., Apt
NIP 197912232005012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

UNIT PELAYANAN KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kepuasan <i>stakeholder</i>	Tingkat kepuasan pelanggan	95 %
		Komplain yang ditindaklanjuti	95 %
2.	Terwujudnya pelayanan yang berkualitas	Kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	100 %
		Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar	94 %
		Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ruang gawat darurat sesuai standar	94 %
		Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar	90 %
		Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar	90 %
3	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai Kemenkes	98 %
		Persentase pelatihan bagi pegawai UPK	95 %
4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan	100 %
5	Terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi	Adanya aplikasi sistem informasi terintegrasi	95 %
6	Terwujudnya akuntabilitas anggaran	Realisasi anggaran	95 %
		Laporan keuangan tepat waktu	95 %
7	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan	Presentase Realisasi Target Pendapatan PNB	lebih dari 90 %
		Presentase Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah Murni	90 %
		Presentase Realisasi Anggaran Bersumber Rupiah PNB	95 %

Kegiatan**Anggaran**

1. Program Pelayanan Kesehatan & JKN
2. Program Dukungan Manajemen

Rp 2,359,262,000.00

Rp 9,169,560,000.00

Total**Rp 11,528,822,000.00**

Jakarta, 31 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS
NIP 19710626200031002



Indri Rooslamati, M.Sc., Apt
NIP 197912232005012003



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5223017, (021) 5201590 (Hunting), Faksimile : (021) 5223017
Surat Elektronik : klinikutama@kemkes.go.id

SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
NOMOR : HK.02.03/XLVI/21/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- Bahwa Unit Pelayanan Kesehatan merupakan Unit Pelaksana Teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa Unit Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pengembangan dan pemuluan kesehatan yang dilaksanakan secara terukur, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan penvegahan;
 - Bahwa untuk menilai kinerja seperti pada dictum diatas, maka diperlukan pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kinerja berdasarkan anggaran yang tersedia;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a,b,c untuk menjamin hukum serta tata tertib administrasi. Perlu dibentuk Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensinya

- Mengingat :
1. PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2024.

KESATU : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggungjawab

kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Unit Pelayanan Kesehatan dengan susunan keanggotaan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai tugas pokok mengumpulkan data, mengolah data, Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Unit Pelayanan Kesehatan.

KEEMPAT : Tugas Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Unit Pelayanan Kesehatan adalah :

- I. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan :
 - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tim;
 - b. Memfasilitasi kebutuhan sumber daya untuk mendukung program tim.
- II. Ketua :
 - a. Menyusun rencana evaluasi dan memonitoring kinerja Unit Pelayanan Kesehatan;
 - b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tim;
 - c. Memberikan masukan kepada penanggungjawab untuk kemajuan kegiatan tim
- III. Wakil Ketua :
 - a. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim;
 - b. Melaksanakan rencana kerja tim;
 - c. Mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim;
 - d. Membantu ketua Menyusun laporan.
- IV. Sekretaris :
 - a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi;

- b. Mempersiapkan rapat koordinasi (Undangan, daftar hadir, notulen)
 - c. Mengkoordinasikan pengarsipan dokumen kegiatan tim
- V. Anggota :
- a. Mengumpulkan data;
 - b. Mengolah data;
 - c. Membantu ketua dan wakil ketua Menyusun laporan.

KELIMA : Semua kegiatan yang berakibat dengan pengeluaran anggaran dibebankan pada DIPA Unit Pelayanan Kesehatan

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau Kembali untuk di perbaiki sebagaimana mestinya

Kesehatan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2025
Kepala Unit Pelayanan

Kementerian Kesehatan



Indri Rooslamati, M.Sc. Apt

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : HK.02.03/XLVI/21/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Penanggung Jawab : Indri Rooslamiati, M.Sc., Apt

Ketua : Hesti Kurniasih, S.E.

Wakil Ketua : dr. Indah Pratiwi

Sekretaris : Balqis Muharamy, A.Md.Gz

Anggota : 1. Erni Novita Sari, SKM
2. Roy Kristiyo, SE
3. Alfi Shariati, S.A.P
4. Fany Triany, S.Ikom
5. Indra Mustholih, S.Kom
6. Wina Happy Lucky, SE
7. Ahmad Fauzan, A.Md

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Indri Rooslamiati, M.Sc. Apt



**KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
UNIT PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR SOP	: OT. 02. 02/ XLVI / 3832 / 2023
TGL PEMBUATAN	: Juni 2014
NOMOR REVISI	: 2
TGL REVISI	: 09 November 2023
TGL EFEKTIF	: 13 November 2023
DISAHKAN OLEH	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI  Indri Rooslamiati, M.Sc, Apt NIP. 197912232005012003
NAMA SOP	: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/MENKES/PER/XI/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4347/2021 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bidang Kesehatan
2. Memahami Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

KETERKAITAN :

1. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan
2. SOP Laporan SIMAK-BMN
3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Peraturan/Pedoman/Standar dalam Penyusunan Kebijakan
2. Alat pengolah data dan alat tulis kantor

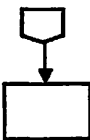
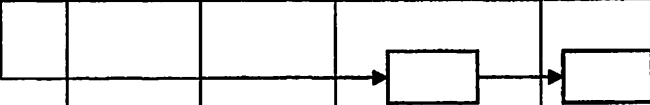
PERINGATAN :

Apabila LAK Unit Pelayanan Kesehatan tidak disusun mengikuti SOP, maka akan mempengaruhi penilaian LAK

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Penyusunan Laporan Tahunan Unit Pelayanan Kesehatan disusun setiap tahun

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI											
No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPK	Kasubbag Adum	Katim Yanmed	Katim Jangmed	Tim Kerja / Staf Pelaksana	Eselon 1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala UPK Memberikan arahan kepada Kasubbag Adum & Katim untuk melaksanakan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja UPK							Surat Sesditjen	5 menit	Disposisi	
2	Kasubag Adum memberikan arahan kepada Staf Pelaksana untuk menyiapkan rencana penyusunan LAK UPK dan mengumpulkan data							Surat, Disposisi	10 menit	Disposisi, kerangka kerja	
3	Staf Pelaksana membuat rancangan rencana kerja							Kerangka kerja	30 menit	Draft rencana kerja	
4	Kasubag Adum memeriksa rancangan rencana kerja, Jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Kepala UPK, Jika tidak diserahkan kepada Staf Pelaksana untuk diperbaiki							Draft rencana kerja	10 menit	Draft rencana kerja	
5	Kepala UPK memeriksa rencana kerja, Jika setuju ditandatangani dan selanjutnya memberikan disposisi kepada Kasubbag Adum untuk mengadakan rapat persiapan. Jika tidak, diserahkan kepada Kasubbag Adum untuk diperbaiki.							Draft rencana kerja	5 menit	Rencana kerja	
6	Kasubag Adum menugaskan staf pelaksana untuk menyampaikan undangan rapat persiapan kepada Para Katim dan Staf di lingkungan UPK							Undangan	5 menit	Tanda terima undangan	
7	(Staf Pelaksana) memfasilitasi pelaksanaan rapat persiapan yang dipimpin Kepala UPK							Tempat rapat, alat pengolah data, bahan rapat	120 menit	Notulen rapat	

17	Kasubbag Adum menugaskan Staf Pelaksana untuk mendokumentasikan LAK, menyampaikan LAK kepada eselon I serta mendistribusikan kepada setiap katim							LAK Eselon I, disposisi	5 menit	LAK Eselon I	
18	Staf pelaksana mendokumentasikan LAK, menyampaikan LAK kepada eselon I serta mendistribusikan kepada Kasubbag Adum.							LAK Eselon I, disposisi	5 menit	LAK Eselon I, Surat Penyampalan	

KERTAS KERJA

PERHITUNGAN KINERJA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X5, No.Kav. 4-9, RT.1/RW.2
Kuningan, Kota Jakarta Selatan

**SURVEY KEPUASAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN									Total
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4
5	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4
6	3	2	3	4	2	3	2	3	2	3
7	3	3	2	4	3	3	3	4	2	3
8	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3
9	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
10	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
11	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3
12	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3
13	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
21	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3
22	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
29	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
30	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	3	4	2	4	3	3	3	4	3	3
41	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
42	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4

[illegible]

142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4
147	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
155	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4
156	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4
157	1	2	2	1	2	3	3	3	2	2
158	1	2	2	1	2	3	3	3	2	2
159	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2
160	3	3	3	1	3	3	3	4	3	3
161	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4
162	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
163	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3
164	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3
165	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2
166	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
167	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
168	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3
171	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4
172	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
173	3	3	2	4	3	4	3	4	2	3
174	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4
175	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
176	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
177	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3
178	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
179	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
180	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3
181	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
184	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
185	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
186	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
187	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
188	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
189	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
190	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3

[illegible]

[illegible]

338	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
339	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
340	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
341	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4
342	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
343	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
344	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
345	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
346	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
347	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
348	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
349	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
350	3	3	3	4	3	3	3	1	4	3
351	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3
352	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1
353	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
354	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
355	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
356	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
357	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
358	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
359	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
360	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
361	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Sumber : Survey Kepuasan UPK Kemenkes RI Tahun Anggaran 2024

Kategori Indikator Kepuasan UPK :

3 – 4 : Puas (354 orang)

1 – 2 : Tidak Puas (7 orang)

Kepuasan Pasien : $354/361 \times 100\% = 98\%$

Jakarta, 03 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kemenkes RI

Ketua Tim Pelayanan Medik dan
Keperawatan



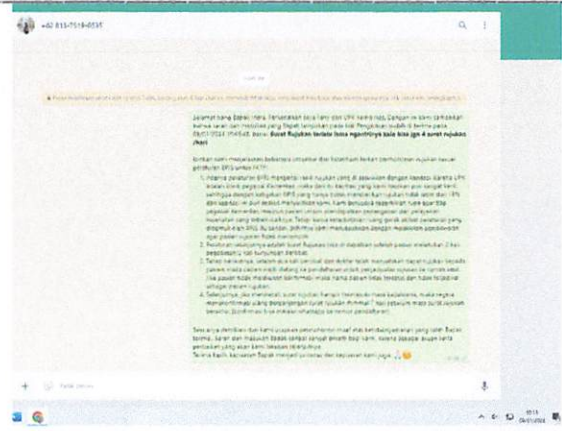
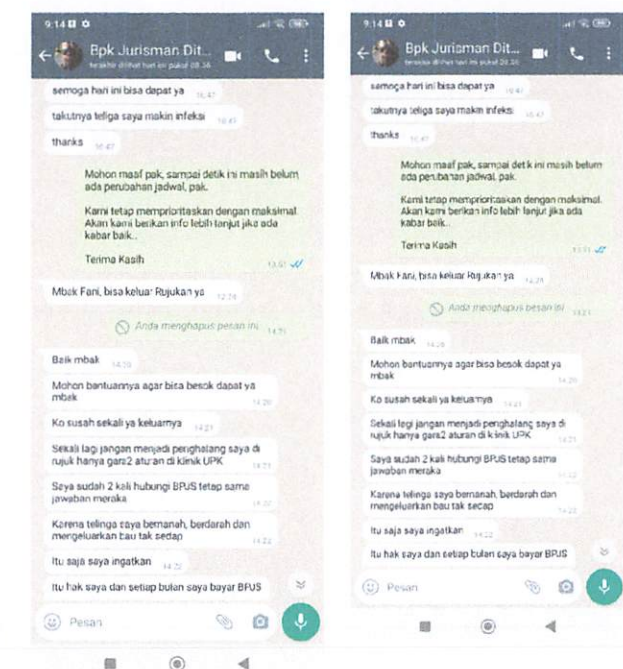
Indri Rooslamiati, M.sc. Apt
NIP 197912232005012003

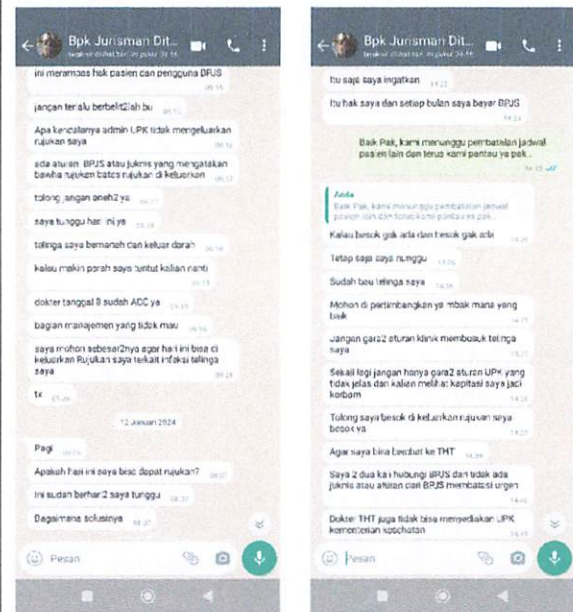
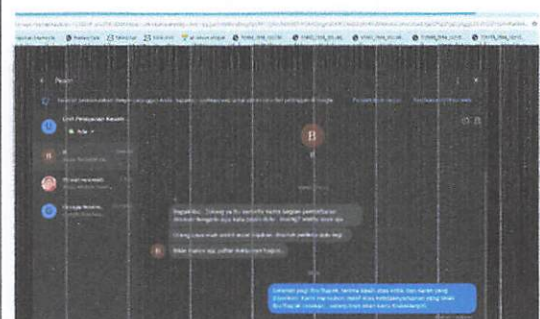


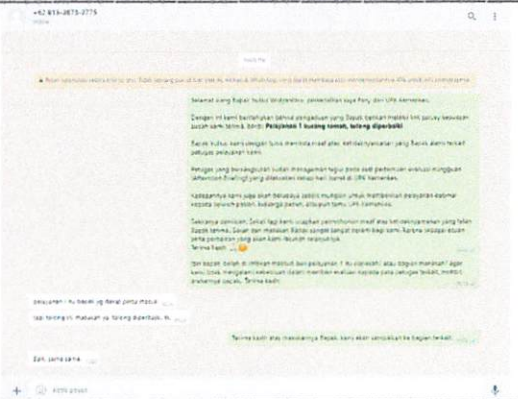
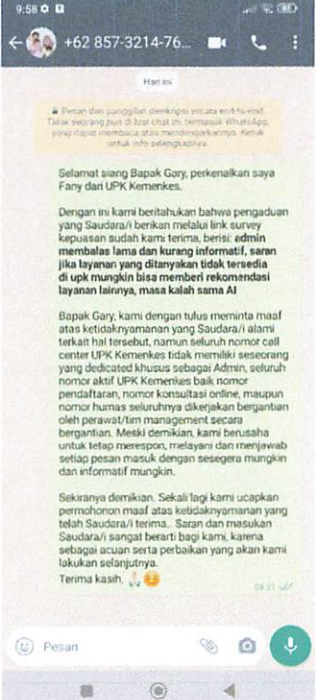
dr. Indah Pratiwi
NIP 199207312022032002

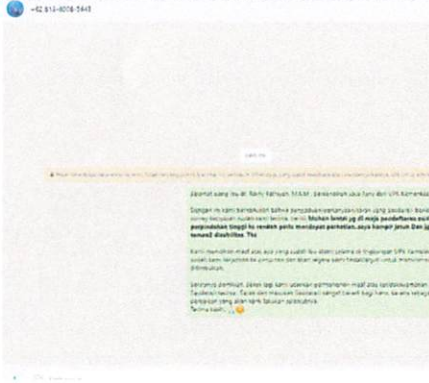
KOMPLAIN YANG DI TINDAKLANJUTI
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES
TAHUN 2024

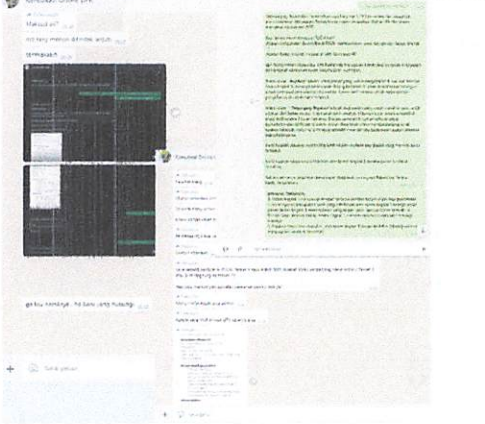
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
TW I				
1.	8 Januari 2024 (komplain Langsung)	Kelanjutan sakit telinga, saya harus segera tindak lanjut ke rs Jakarta. Saya tidak melihat kalua ada ketentuan konfirmasi kedatangan 7 hari sebelum surat rujukan kadaluarsa. Saya sudah darurat, dan harus segera ditangani, tolong bantu saya mbak!	- Mengedukasi aturan pelayanan PBJS dan rujukan UPK Kemenkes kepada pasien. - Ini merupakan kali kedua pasien mendesak agar dibantu, dan berdasarkan pemeriksaan pasien tidak termasuk dalam pasien gawat darurat sehingga petugas tetap menjelaskan mengenai alur rujukan UPK yang tepat. - Petugas menyarankan agar pergi langsung ke IGD rumah sakit terdekat apabila mendapati kondisi yang buruk. (8 Januari 2024)	Nama Petugas Pelapor : Fany Triany Nama pemberi komplain : A Tanggal Komplain Masuk : 08/01/2024 Tanggal Komplain Selesai : 08/01/2024 Keluhan : Kelanjutan sakit telinga saya, saya harus segera tindak lanjut di rumah sakit Jakarta. Tetapi saya tidak melihat kalau ada ketentuan konfirmasi kedatangan 7 hari sebelumnya. Tapi saya sudah darurat, tolong bantu saya mbak! Tindak Lanjut Komplain : - Mengedukasi bahwa ada aturan dari BPJS kepada penyedia layanan kesehatan - Ini sudah kali kedua pasien meminta rujukan secara mendesak dengan alasan darurat yang pertama kami bisa bantu karena kebutuhan ada slot kosong di jadwal rujukan tercepat yang kedua ini kami tidak ada lagi slot kosong maka itu pasien harus menunggu di jadwal yang terlan di temui an yaitu 17 Januari 2024 - Kami menyarankan jika sudah sakit tidak tertahankan. Seandainya bisa langsung datang ke IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan menggunakan BPJS - Pasien pun memahami peraturan UPK dan BPJS terkait rujukan Keterangan : Selesai (Petugas Sendiri)

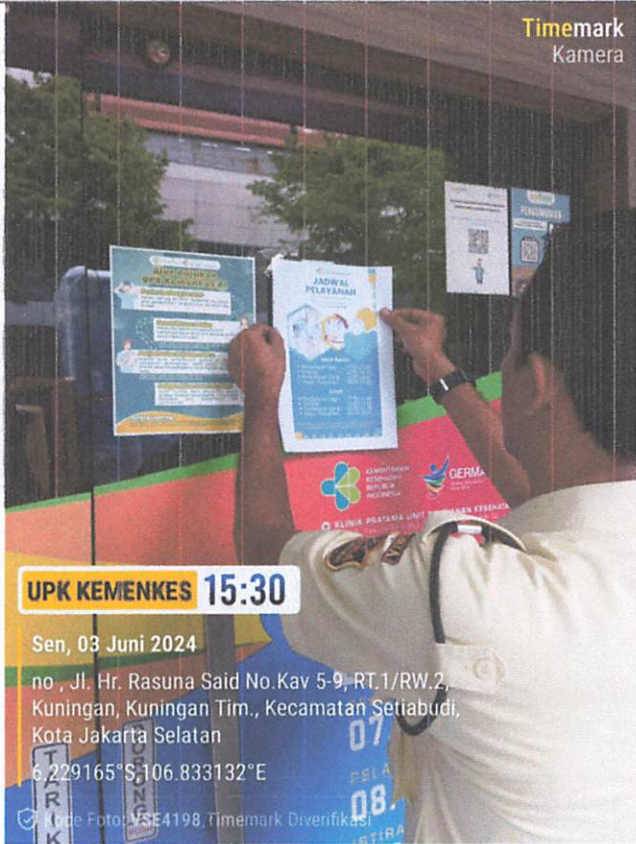
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
2.	8 Januari 2024 (Link Pengaduan)	Surat rujukan terlalu lama ngantrinya kalau bisa jangan 4 rujukan perhari.	Petugas memberikan penjelasan melalui pesan singkat, beri tentang informasi mengenai prosedur dan ketentuan terkait permohonan surat rujukan. Petugas memohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah dirasakan oleh pasien. (9 Januari 2024)	
3.	9 Januari 2024 (Pengaduan langsung kelanjutan dari 8 Januari 2024)	Pasien mendesak mengalami kondisi gawat darurat dan meminta di berikan surat rujukan instan.	Petugas beserta dokter yang bertugas menanggapi permasalahan pasien dan meminta izin untuk dilakukan pemeriksaan, namun pasien menolak karena hanya perlu surat rujukan saja. Sebelumnya pasien sudah diberikan saran untuk datang ke UGD rumah sakit apabila mendapati kondisi kesehatan yang gawat, namun pihak rumah sakit tidak mendapatkan kondisi fisik pasien dengan hal tersebut. Pasien mendatangi UPK dan	

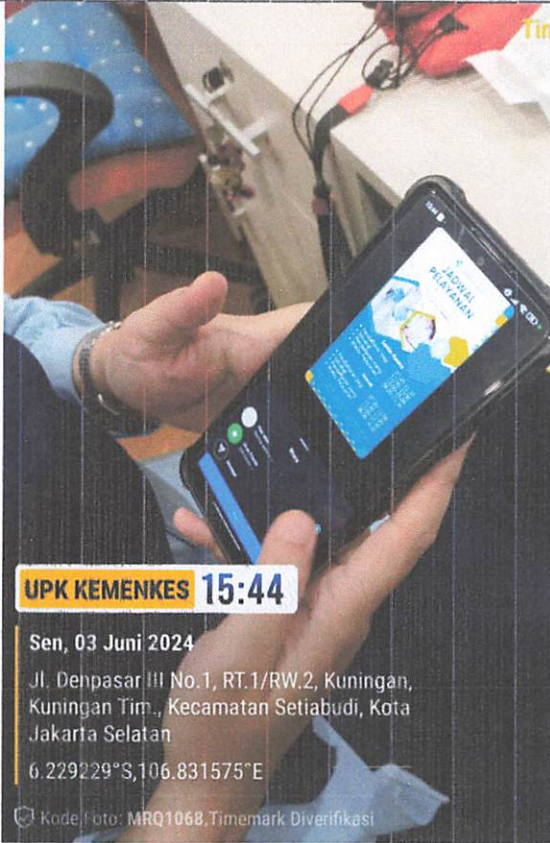
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
			klaim UPK mempersulit dan merugikan pasien karena tidak memberikan surat rujukan. Surat rujukan pasien sudah dikeluarkan pihak UPK pada tanggal 18 Januari 2024, namun pasien tidak mau menunggu waktu yang ditentukan. Petugas menenangkan dan berusaha yang terbaik untuk Kesehatan dan kenyamanan pasien. (9 Januari 2024)	
4.	11 Januari 2024 (Google Chat)	Pasien mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan dari bagian pendaftaran.	Petugas mengirimkan pesan permohonan maaf dan akan segera menindaklanjuti atau menegur orang yang bersangkutan. (12 Januari 2024)	

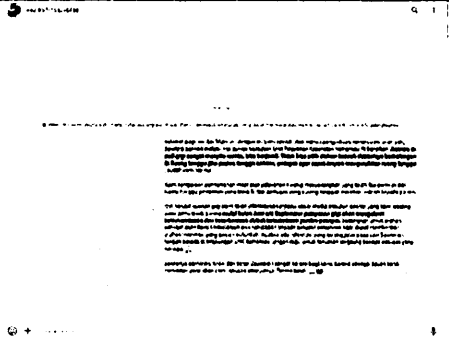
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
5.	26 Januari 2024 (Link Pengaduan)	Pelayanan 1 kurang ramah, tolong diperbaiki.	Petugas mengirimkan pesan permohonan maaf dan akan segera menindaklanjuti atau menegur orang yang bersangkutan. (26 januari 2024)	
6.	13 Februari 2024 (Link Pengaduan)	Admin membalas lama dan kurang informatif, kalah sama AI.	Petugas mengirimkan pesan singkat berisi permohonan maaf karena keterbatasan tenaga kerja menghambat proses informasi yang segera ingin di dapatkan oleh pasien atau masyarakat. (13 Februari 2024)	

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
7.	20 Februari 2024 (Link Pengaduan)	Bagian pendaftaran lama, multivitamin yang diberikan tidak sama dengan sebelumnya.	Petugas memberikan respon melalui pesan singkat berisi penjelasan dan permohonan maaf. (20 Februari 2024)	
8.	14 Maret 2024	Lantai di meja pendaftaran swab licin. Lantai dan tangga tidak ramah disabilitas.	Petugas memberikan respon dan mengucapkan terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan oleh pasien. Petugas meneruskan saran tersebut kepada atasan agar dapat segera ditindaklanjuti. (14 Maret 2024)	
9.	14 Maret 2024	Pegawai terlalu banyak bermain HP, suara saat ngobrol pada jam istirahat berisik dan mengganggu.	Petugas memberikan respon melalui pesan singkat berisi penjelasan. (14 Maret 2024)	

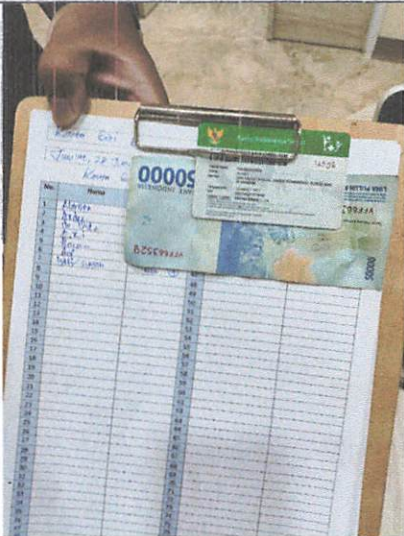
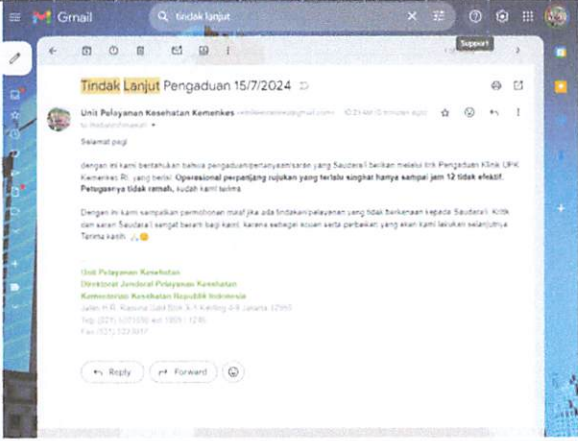
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
TW II				
1	16 April 2024 (komplain Langsung) NAMA DIKOSONGKAN PENGADU	Sudah baik, mohon obat jantung bisa lebih lengkap eg. Angioten, vbloc, ardiurm	Petugas menanggapi saran pengaduan pasien melalui pesan singkat dan melanjutkan kepada pimpinan. (16 April 2024)	
2	24 April 2024 (Komplain langsung Whatsapp) tidak – NAMA DIKOSONGKAN PENGADU	Pengadu memberikan pesan beruntun yang berisikan pertanyaan mengenai rujukan.	Petugas memberikan edukasi terkait alur rujukan yang ada di UPK dan secara umum di FKTP lainnya. (24 April 2024)	

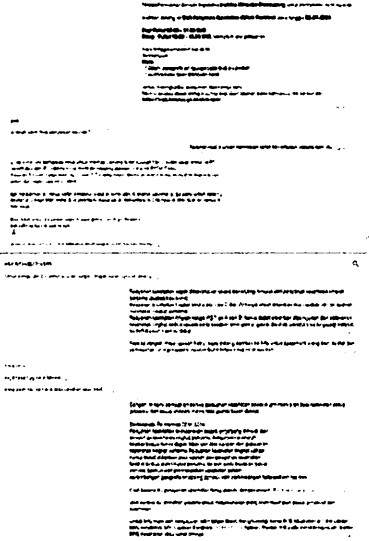
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
3	3 Juni 2024 (Pengaduan Langsung) Melani Pinondang Tampubolon	1. Pasien datang pada pada waktu jam pendaftaran tutup. 2. Pasien marah karena waktu pada jam tangan dan jam UPK berbeda. 3. Pasien merasa UPK sepi dan seharusnya masih bisa menerima pasien lain/membantunya yang hanya ingin mengambil surat rujukan. 4. Pasien mempertanyakan jadwal pelayanan yang tertera pada stiker pintu menunjukkan "pendaftaran sampai jam 12.00" Pasien merasa tidak di layani dan ingin menemui pejabat UPK 6. Pasien ingin melaporkan petugas kepada ombudsman, karena tidak melayani sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.	1. Petugas berjaga menjelaskan mengenai peraturan jam pendaftaran, namun pasien tetap tidak terima. Masalah kemudian ditangani oleh tim penanganan komplain. 2. Tim penanganan komplain menjelaskan prosedur dan peraturan waktu layanan, pendaftaran dan istirahat pegawai. Tetapi pasien tidak terima dan menganggap selama waktu tersebut pelayanan kosong dan tidak ada pasien, padahal di dalam ruang dokter masih ada pasien yang melakukan pengobatan. 3. Tim penanganan komplain memohon maaf atas stiker pelayanan pada pintu yang masih dalam proses perubahan, namun informasi sudah tertera pada sosial media dan website UPK.	 Timemark Kamera UPK KEMENKES 15:30 Sen, 03 Juni 2024 no , Jl. Hr. Rasuna Said No.Kav 5-9, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 6.229165°S,106.833132°E Code Foto: FSE4198, Timemark Diverifikasi

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
			4. Tim penanganan komplain menjelaskan bahwa waktu yang digunakan adalah waktu yang ada di UPK, waktu tidak dapat mengikuti pada jam tangan pasien karena sifatnya subjektif. 5. Tim penanganan komplain memohon kpd pasien untuk mengisi form komplain, namun pasien menolak dan menuduh petugas merekam situasi pada saat itu. 6. Tim penanganan komplain memberikan bukti bahwa sosial media dan website sudah tertera jam pelayanan yang dijelaskan tadi, namun pasien menuduh petugas mengganti/update jadwal pelayanan pada saat dirinya komplain. 7. Pasien memanggil PLH untuk menghadapi dan menjelaskan permasalahan tsb, namun	

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
			pasien menuduh petugas menunjuk orang secara. 8. acak untuk disebut sebagai PLH. 9. Tim berulang kali memohon maaf, dan ucapkan terimakasih untuk masukan yang diberikannya. 10. Petugas menjelaskan bahwa UPK adalah UPT yang dapat membuat kebijakan sendiri sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. 11. Petugas memperbaiki pengumuman jam pelayanan. (3 Juni 2024)	
4	6 Juni 2024 (Survey Kepuasan Masyarakat) Aas Marisah	Antrian poli gigi sangat menyita waktu.	Petugas memberikan jawaban melalui pesan singkat mengenai situasi kekurangan tenaga medis di pelayanan gigi dan mulut UPK Kemenkes. (6 Juni 2024)	

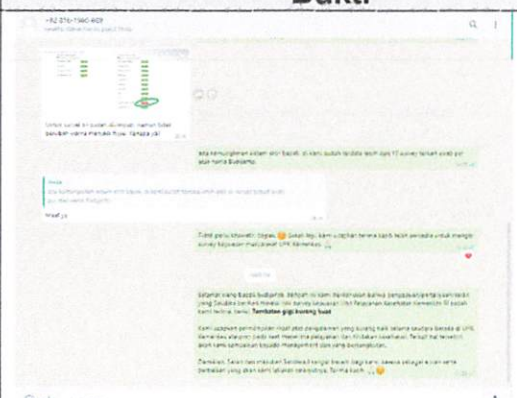
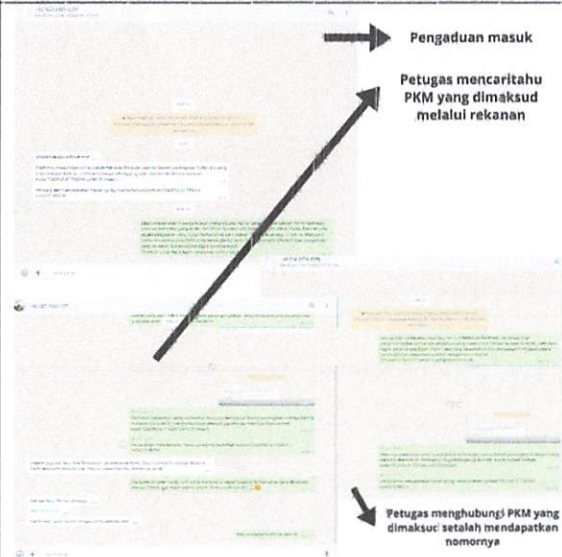
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
5	20 Juni 2024 (Whatsapp)	Tidak dapat antrian pelayanan gigi, padahal sudah datang lebih pagi. Pasien memberikan tuduhan bahwa nama yang masuk adalah titipan orang dalam.	Menjelaskan alasan pasien gigi yang dibatasi akibat kekurangan tenaga medis. Informasi sudah di sosialisasikan melalui status wa, sosial media dan di tempel pada papan pengumuman. Menjelaskan, bahwa banyak pasien yang datang lebih pagi dan langsung memenuhi kuota harian. Petugas akan memberikan informasi jika ada salah satu pasien yang terdaftar batal berobat, agar bisa yang bersangkutan dapat menggantikan kuota kosong tersebut. Keluhan berlanjut melalui pesan whatsapp.. dan penjelasan sesuai prosedur petugas sampaikan. (20 Juni 2024)	 

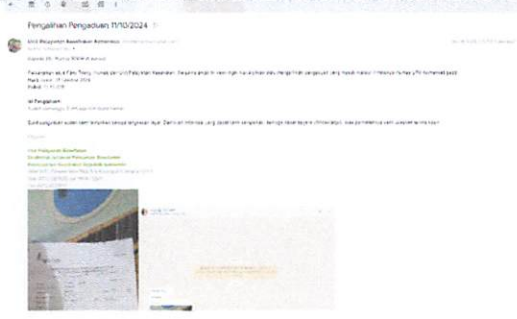
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
6	28 Juni 2024 (Langsung) NAMA TIDAK DISEBUTKAN	Saudara yang tidak mau disebutkan melihat ada peserta/pasien BPJS memberikan uang kepada petugas keamanan dengan maksud agar mendapatkan antrian/pelayanan ke pelayanan gigi dan mulut.	Petugas keamanan melaporkan kepada petugas penanganan komplain, uang senilai Rp.50.000 diamankan. Uang dikembalikan ketika yang bersangkutan kembali lagi untuk menanyakan bisa atau tidak mendapatkan pelayanan gigi dan mulut. Selain mengembalikan uang, yang bersangkutan diberikan edukasi mengenai gratifikasi yang tidak diperbolehkan. (28 Juni 2024)	
TW III				
1	7/15/2024 Hama Allah	Operasional perpanjang rujukan yang terlalu singkat hanya sampai jam 12 tidak efektif. Petugasnya tidak ramah	Tindak lanjut melalui email. Petugas mengirimkan pesan permohonan maaf dan ucapan terimakasih atas masukan yang diberikan. 7/25/2024	

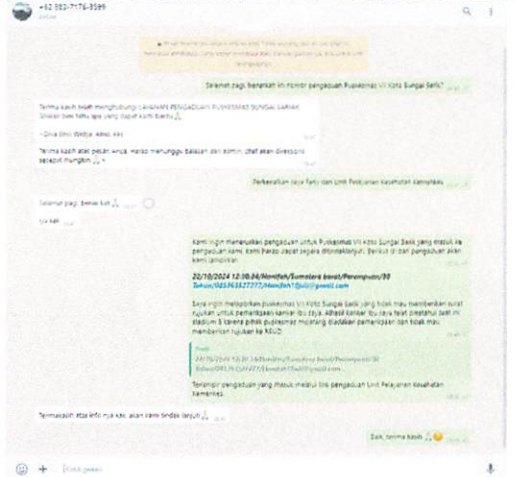
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
3	7/25/2024 Hertina Veronika Simatupang	sy ke klinik upk kemenkes hanya untuk memperpanjang surat rujukan tiap 3 bulan sekali, untuk ke RS Jakarta, lalu dari RS Jakarta hanya minta perpanjang rujukan untuk ke RSCM Cipto. Rujukan 3 bulan hanya bisa saya pakai 2-3 x kunjungan dokter di rscm, karena konsultasi tiap sebulan sekali dan keperluan ambil obat. sgt melelahkan sy harus ikutin prosedur biasa di klinik dan rs jakarta, padahal sy ga perlu untuk ketemu dokter di 2 tmpt tsbt (klinik & rs jakarta) sy harus kerja...sementara di 3 tempat di atas layanan hanya di hari kerja. Bisa tidak untuk karyawan seperti saya, proses ini di permudah? Setidaknya bisa di online kan. 🙏 gimana mau izin 2 x untuk urusan perpanjangan surat rujukan doang.	Mengedukasi kembali mengenai prosedur sesuai ketentuan Permenkes 7/25/2024	
4	7/11/2024 Doni Simangunsong	Bagaimana sistem pengambilan antrian ke	Petugas mendengarkan keluhan dan menjawab	Pengaduan Langsung

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
	- Ditjen Mutu	pelayanan gigi, karena saya sudah 2 kali tidak dapat kuota. Bisa tidak saya mendapatkan kepastian antrian untuk anak saya, jadi absen sekolahnya tidak sia-sia seperti ini (tidak dapat pelayanan gigi & mulut).	seluruh pertanyaan yang diberikan. Petugas menegaskan tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Petugas menjelaskan runutan pengambilan nomor antrian untuk pelayanan gigi dan mulut, alasan mengapa banyak orang yang tidak mendapatkan kuota harian pelayanan gigi dan mulut. 7/11/2024	
5	7/30/2024 Aulia Kamal Pasha - Ombudsman	Kenapa rujukan BPJS sekarang perlu mengantri selama 2 minggu, karena dulu perasaan saya cepet dan langsung terbit. Tidak perlu menunggu. Kenapa rujukan BPJS dibatasi perharinya, saya tanyakan ke bagian BPJS katanya tidak ada pembatasan.	Petugas menjelaskan terkait rujukan yang perlu dilakukan assesment dokter sebanyak 2 kali pertemuan/pemeriksaan di hari yang berbeda (tujuannya melihat perkembangan kesehatan setelah pengobatan pertama, jika tidak ada perubahan maka surat rujukan akan terbit di pengobatan ke-2, artinya FKTP tidak bisa menangani penyakit tsb) - hal tersebut dilakukan oleh seluruh FKTP bukan hanya UPK	Pengaduan Langsung

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
			Kemenkes. Petugas menjelaskan mengenai: 1. rasio rujukan berdasarkan kapitasi 2. pihak bpjs yang tidak menyebutkan secara gamblang mengenai pembatasan 3. 3. BPJS memberikan ranking buruk jika FKTP kedapatan memberi rujukan di atas nilai kapitasi Pemberi aduan memahami kondisi dan situasi FKTP. Yang bersangkutan dengan sukarela membantu FKTP untuk peraturan BPJS yang terkesan abu-abu dengan membuat pengaduan. 7/30/2024	

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
6	9/19/2024 budijanto	Tambalan gigi kurang kuat	Memberikan tanggapan melalui pesan pendek, menyampaikan ke manajemen terkait aduan tersebut agar segera dapat dilakukan perbaikan. 9/23/2024	
7	9/21/2024 Nama disebutkan tidak	Maaf mau malaporkan untuk puskesmas area blora kec.jiken,ds Bleboh penanganan bidanya kurang maksimal dan tidak bs membantu warga setempat yg sakit dan membutuhkan bantuan bidan,TOLONG DI TINDAK LANJUTI,mkasih. Intinya Bidan menyepelekan Pasien yg lag membutuhkan bantuan,TOLONG DI TINDAK LANJUTI.MKSIH	Membalas/merespon pesan pengaduan yang diberikan Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melanjutkan pesan tersebut kepada PKM yang bersangkutan. 9/23/2024	 Pengaduan masuk Petugas menceritakan PKM yang dimaksud melalui rekanan Petugas menghubungi PKM yang dimaksud setelah mendapatkan nomornya

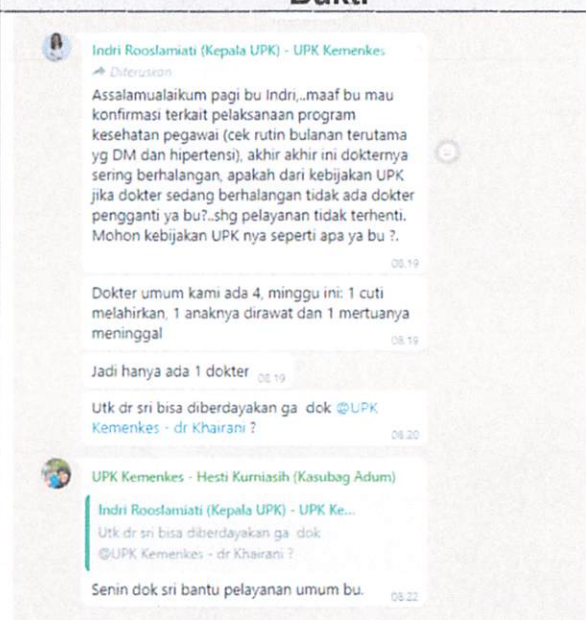
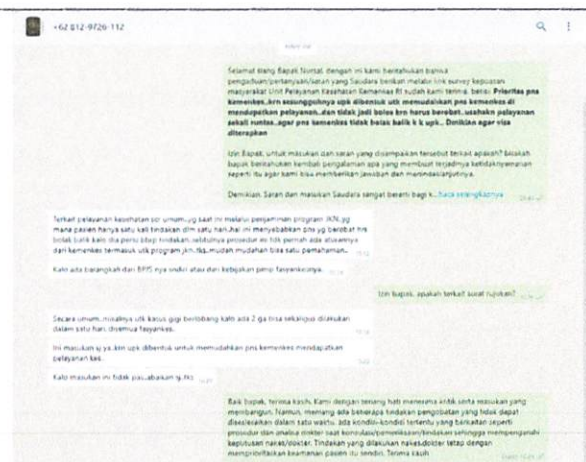
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
TW IV				
1	10/10/2024 Rian Adrian	Pengaduan terkait pelayanan di RS dr. Sardjito	Petugas mengalihkan pengaduan melalui email kepada pihak yang berwenang yaitu Direktorat Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Humas RS dr Sardjito. 10/10/2024	
2	10/11/2024 Nama disebutkan tidak	Pengaduan terkait pelayanan di RSUP dr Kariadi	Petugas melakukan pengalihan pengaduan melalui email kepada pihak yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Humas RSUP dr Kariadi. 11/11/2024	
3	10/14/2024 Arga	Kenapa tidak bisa dihubungi (021) 5223017	Petugas memberikan respon melalui email yang berisi penjelasan bahwa telepon yang dimaksud tengah mengalami kerusakan dan menunggu Biro Umum untuk perbaikan proses perbaikan. 10/23/2024	

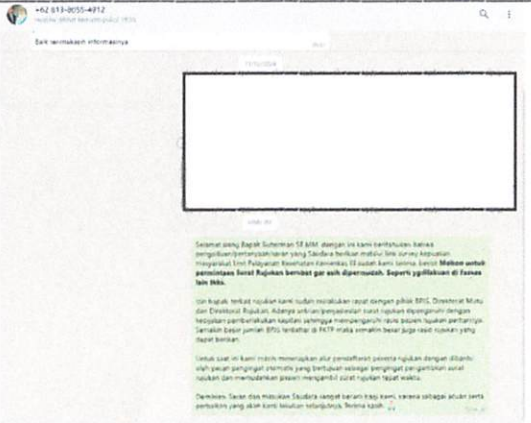
NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
4	10/22/2024 Hanifah	Kenapa rujukan BPJS sekarang perlu mengantri selama 2 minggu, karena dulu perasaan saya cepet dan langsung terbit. Tidak perlu menunggu. Kenapa rujukan BPJS dibatasi perharinya, saya tanyakan ke bagian BPJS katanya tidak ada pembatasan.	Petugas meneruskan pengaduan kepada bagian pengaduan Puskesmas VII Koto Sungai Sarik dan meminta untuk segera ditindaklanjuti. 10/23/2024	

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
5	11/8/2024 Christina Handayani Dewi	Sore Saya baru datang ke UPK Kemenkes minta perpanjang rujukan, tp dapat nya di tanggal 3 Des 24. Sedangkan saya sekarang kondisi berobat, pakai tongkat, dan harus fisioterapi berkelanjutan. Tidak mungkin saya berhenti terapi 2 Minggu Dan saya tdk mendapatkan solusi utk dapat surat. Bagaimana solusinya supaya saya bs lgsg dapat surat. Apakah memang harus menunggu selama itu utk berobat kembali. Pdhl permasalahannya bukan di pembayaran BPJS saya. Apakah ada solusi yg bisa diberikan kepada saya? Terima kasih	1. Petugas melakukan telusur masalah dan merespon pengadu melalui pesan singkat 2. Petugas mengedukasi pengadu terkait kapitasi, kuota rujukan perhari dan aplikasi pengingat otomati 3. Petugas menjelaskan bahwa sudah ada pesan pengingat kepada pengadu H-20 sebelum masa rujukan habis agar dapat melakukan konfirmasi untuk perpanjang surat rujukan 4. Petugas menjelaskan kronologi mengapa pengadu mendapatkan antrian panjang terkait surat rujukan. Petugas mengingatkan bahwa pengadu telah mengabaikan pesan pengingat dan tidak melakukan konfirmasi untuk perpanjang surat rujukan 5. Petugas memberikan himbauan untuk selalu berkoordinasi kepada	

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
			petugas terkait rujukan melalui wa, ataupun datang langsung ke klinik. 11/8/2024	
6	11/21/2024 dr Muthia	1. Penyampaian petugas pelayanan tidak menyenangkan 2. Petugas pelayanan menolak pasien karena sudah mencapai limit harian 3. Pasien meminta untuk perbaikan sesuai dengan standar pelayanan, pelayanan prima dan etos kerja semestinya	4. Petugas mempersilahkan, menyimak, memberikan respon permohonan maaf 5. Petugas menyampaikan bahwa seluruh wewenang, kebijakan dan keputusan adalah milik pimpinan 6. petugas akan menindaklanjuti dengan menyampaikan keluhan dan saran pasien kepada pimpinan 7. Pimpinan mengarahkan untuk dilakukan pelatihan pelayanan prima untuk memaksimalkan pelayanan kepada seluruh pasien UPK Kemenkes 8. - Sudah dilaksanakan	Pengaduan Langsung

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
			pelatihan pelayanan prima bagi pegawai UPK Kemenkes. 12/21/2024	
7	9/27/2024 Hubaib TV – Google Review	- Antrian lama - Proses lama - Rujukan lama	Petugas menanggapi ulasan tersebut dengan menyampaikan permohonan maaf sekaligus edukasi terkait rujukan yang panjang, proses pelayanan lama, dan antrian pelayanan yang panjang. 10/14/2024	

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
8	12/11/2024 Tidak disebutkan Namanya	1. Pelaksanaan program kesehatan pegawai dokternya sering berhalangan 2. apakah tidak ada dokter pengganti jika dokter yang bertugas berhalangan? 3. dimohon agar pelayanan tidak terhenti	1. Ibu Indri Rooslamiati menanggapi dan menjelaskan kondisi petugas/dokter 2. Ibu Indri Rooslamiati menunjuk dokter spesialis paru untuk turut bantu menangani pasien apabila dokter bertugas berhalangan. 12/11/2024	
9	12/17/2024 Nursal	Tindakan kesehatan di UPK mohon dapat dilakukan satu waktu agar pasien tidak bulak-balik atau bolos kerja.	1. Petugas mengedukasi pasien tentang adanya beberapa kondisi pasien yang perlu mendapatkan tindakan lebih dari satu kali 2. Keputusan dokter diambil atas dasar memprioritaskan keselamatan dan keamanan pasien. 12/18/2024	

NO	Tanggal	Komplain	Tindak Lanjut	Bukti
10	12/17/2024 Suherman	Mohon permohonan surat rujukan dipermudah	1. Petugas mengedukasi terkait kebijakan serta alur rujukan yang mempengaruhi pelayanan di UPK Kemenkes 2. -Petugas menjelaskan dengan rinci terkait alur pengajuan surat rujukan hingga aplikasi pengingat otomatis untuk memudahkan pasien mengingat jadwal pengambilan surat rujukan. 12/18/2024	

Perhitungan Komplain yang ditindaklanjuti Tahun 2024 = $32/32 \times 100\% = 100\%$

Mengetahui,

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan,


 Indri Rooslamati, M.sc. Apt
 NIP 197912232005012003

Jakarta, 3 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,


 Hesti Kurniasih, SE
 NIP 198507012008122002

**KELENGKAPAN PENGISIAN INFORMED CONSENT
UNIT PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2024**

Bulan	Klinik Pratama						Klinik Utama									Total Informed Consent		
	Ruang Pelayanan Gigi dan Mulut			Ruang Tindakan			Spesialis Jantung			Ruang Tindakan			UGD					
	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent	Lengkap	Tidak Lengkap	Jumlah Tindakan Yang Memerlukan Informed Consent
Januari	8	0	8	6	0	6	1	0	1	220	0	220	3	0	3	238	0	238
Februari	170	0	170	3	0	3	0	0	0	28	0	28	2	0	2	203	0	203
Maret	145	0	145	6	0	6	1	0	1	40	0	40	0	0	0	192	0	192
April	164	0	164	4	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	170	0	170
Mei	199	0	199	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	206
Juni	133	0	133	9	0	9	0	0	0	23	0	23	0	0	0	165	0	165
Juli	212	0	212	9	0	9	3	0	3	181	0	181	1	0	1	406	0	406
Agustus	210	0	210	10	0	10	0	0	0	1	0	1	2	0	2	223	0	223
September	170	0	170	6	0	6	0	0	0	11	0	11	0	0	0	187	0	187
Oktober	167	0	167	5	0	5	0	0	0	50	0	50	3	0	3	225	0	225
November	119	0	119	4	0	4	1	0	1	39	0	39	1	0	1	164	0	164
Desember	131	0	131	0	0	0	1	0	1	35	0	35	1	0	1	168	0	168
Total	1828	0	1828	69	0	69	7	0	7	628	0	628	15	0	15	2547	0	2547
Target	100%																	
Realisasi	100																	
Capaian	100																	



 Kepala Unit Pelayanan Kesehatan

 Indri Rooslamiati, M.sc. Apt

 NIP 197912232005012003

Jakarta, 06 Januari 2025
 Ketua Tim Pelayanan Medik dan Keperawatan



 dr. Indah Pratiwi

 NIP 199207312022032002

**Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Sesuai Standar
Unit Pelayanan Kesehatan
Tahun 2024**

Indikator	Bulan	Dokumen Terlayani	Sesuai Standar	Tidak Sesuai Standar	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis	Januari	2111	2005	106	94	95	101
	Februari	1667	1572	95	94	94	100
	Maret	1625	1575	50	94	97	103
	April	1424	1364	60	94	95.79	101.90
	Mei	1702	1649	53	94	96.89	103.07
	Juni	1507	1480	27	94	98.21	104.48
	Juli	2075	2042	33	94	98.41	104.69
	Agustus	2005	1980	25	94	98.75	105.06
	September	1860	1847	13	94	99.30	105.64
	Oktober	1899	1879	20	94	98.95	105.26
	November	1587	1534	53	94	96.66	102.83
	Desember	1636	1622	14	94	99.14	105.47
Total		21098	20549	549	94	97	104

Sumber : Simklinik UPK Kemenkes

Jakarta, 03 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kemenkes RI

Ketua Tim Penunjang Medik



Indri Rooslamiati, M.sc. Apt
NIP.197912232005012003



Balqis Muharamy, A.Md.Gz
NIP 199207312022032002

WAKTU TUNGGU HASIL PELAYANAN LABORATORIUM RGD
UNIT PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024

Indikator	Bulan	Dokumen Terlayani	Sesuai Standar	Tidak Sesuai Standar	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Laboratorium RGD	Januari	0	0	0	94	100	106
	Februari	0	0	0	94	100	106
	Maret	4	4	4	94	100	106
	April	1	1	0	94	100	106
	Mei	1	1	0	94	100	106
	Juni	0	0	0	94	100	106
	Juli	1	1	0	94	100	106
	Agustus	2	2	0	94	100	106
	September	0	0	0	94	100	106
	Oktober	3	3	0	94	100	106
	November	0	0	0	94	100	106
	Desember	0	0	0	94	100	106
Total		12	12	0	94	100	106

Sumber : Simklinik UPK Kemenkes

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Indri Rooslamjati, M.Sc., Apt
NIP. 197912232005012003

Jakarta, 03 Januari 2025
Ketua Tim Penunjang Medik



Balqis Muharmy, A.Md.Gz
NIP 199107262022032002

**WAKTU TUNGGU PELAYANAN OBAT SESUAI STANDAR
UNIT PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024**

Indikator	Bulan	Dok Terlayani	Sesuai Standar	Tidak Sesuai Standar	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Pelayanan Obat	Januari	1154	1136	18	90	98	109
	Februari	875	869	6	90	99	110
	Maret	893	834	59	90	93	104
	April	781	735	46	90	94	105
	Mei	867	810	57	90	93	104
	Juni	802	760	42	90	95	105
	Juli	1119	1030	89	90	92.05	102
	Agustus	964	954	10	90	98.96	110
	September	875	856	19	90	97.83	109
	Oktober	1032	1004	28	90	97.29	108
	November	913	896	17	90	98.14	109
	Desember	948	937	11	90	98.84	110
Total		11223	10821	402	90	98	109

Sumber : Simklinik UPK Kemenkes

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Indri Rooslamiati, M.Sc., Apt
NIP 197912232005012003

Jakarta, 03 Januari 2025

Ketua Tim Penunjang Medik



Balqis Muharamy, A.Md.Gz
NIP 199107262022032002

**Waktu Tunggu Rawat Jalan Sesuai Standar
Unit Pelayanan Kesehatan
Tahun 2024**

Indikator	Bulan	Dok Terlayani	Sesuai Standar	Tidak Sesuai Standar	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Rawat Jalan	Januari	1111	1096	15	90	99	110
	Februari	833	828	5	90	99	110
	Maret	826	816	10	90	99	110
	April	770	763	7	90	99	110
	Mei	824	818	6	90	99	110
	Juni	802	790	12	90	99	109
	Juli	1111	1093	18	90	98	109
	Agustus	1011	1003	8	90	99	110
	September	979	974	5	90	98	109
	Oktober	1026	1009	17	90	98	109
	November	889	859	30	90	97	107
	Desember	957	940	17	90	98	109
Total		11139	10989	150	90	99	110

Sumber : Simklinik UPK Kemenkes

Jakarta, 03 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kemenkes RI



Indri Rooslamiati, M.sc. Apt
NIP 197912232005012003

Ketua Tim Pelayanan Medik dan
Keperawatan



dr. Indah Pratiwi
NIP 199207312022032002

KELAS EDUKASI
UNIT PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024

NO	TANGGAL	TEMA	NARASUMBER	MODERATOR
1	7 March 2024	Kesehatan dan Keselamatan Kerja : Hak atau Kewajiban Pekerja?	Dr. Robiana Modjo, SKM, M.Kes	Faya Rahmanda Oktaviola Putri, SKM
			Dr. dr. Ramzi Amin, Sp.M, Subsp.VR	
2	21 March 2024	Penderita Penyakit Maag Aman Berpuasa, Mitos atau Fakta?	dr. Saskia Aziza Nursyirwan, Sp.PD - KGEH	Balqis Muharamy, A.Md.Gz
			Yudhi Adrianto, S.Gz, SE, MKM, AIFO	
3	13 June 2024	Lansia Produktif : Lansia Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat	dr. Arundhati Nugrahaning Adji, Sp.KJ (K)	Fany Triany, S.ikom
			dr. Wawan Budisusilo, Sp.K.O	
4	4 July 2024	Arthritis Autoimun & Psoriasis : harus pasrah atau marah?!	dr. Johanda Damanik, Sp.PD	dr. Khairani Ramadhani
			dr. Mardiaty Ganjardani, Sp. DVE	
5	31 July 2024	Sudahkah Anak Kita Mendapatkan Hak Kesehatannya?!	dr. Cahya Dewi Satria, Sp. A(K)	Fenny Alvionita, S.Keb, Bd.
			Prof. Dr. Nurussakinah Daulany, M.Psi, Psikolog	
6	15 August 2024	Dukung Pemberian ASI Eksklusif Untuk Wujudkan Generasi Produktif	Dr. dr. Wiryani Pambudi, Sp. A, IBCLC	Fenny Alvionita, S.Keb, Bd.
			dr. Astri Pramanni, IBCLC	
7	29 August 2024	Buang Stigma Negatif dengan pahami masalah infertilitas	Hartanto Bayuaji, MD, Ph.D	dr. Indah Pratiwi
			Prof. Silvia Werdhy Lestari, MD, MS, PhD, Sp.And	
8	12 September 2024	Fenomena Cuci Darah pada Anak dan Dewasa	Dr. dr. Eka Laksmi Hidayati, Sp.A(K)	dr. Khairani Ramadhani
			Dr. dr. Wachid Putranto, Sp.PD-KGH, FINASIM	

NO	TANGGAL	TEMA	NARASUMBER	MODERATOR
9	26 September 2024	Rahasia Senyum Berkilau : Panduan Praktis Gigi Sehat & Kuat	drg. Annisa Sabhrina Dr. drg. Rina Permatasari, Sp.KG ,.	drg. Irawan Soedino
10	17 October 2024	Yuk, Jaga Sendi, Hidup Aktif dan Bebas Nyeri	Dr. dr. Rudi Hidayat, Sp.PD, K-R Muhammad Irfan S.Ft, SKM, M.Fis	Asti Safitri, A.Md , Kes
11	28 November 2024	Bahan Aktif yang berkualitas : Kunci Skincare yang aman	Dr. dr. Dhelya Widasmara, Sp.D.V.E, Subsp. D.T, FINS DV, FAADV Apt, Dra. Shelly Taurhesia, PhD, F.A.C.P	Nur Chasanah, S.Farm, Apt.,
12	5 December 2024	Kualitas Hidup Lebih Baik Berkat Manajemen Gula Darah	dr. Khomimah, Sp.PD - KEMD, FINASIM Herlina, S.Gz, RD	Balqis Muharamy, A.Md , GZ

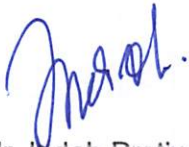
$$\text{Pelaksanaan Kelas Edukasi} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kelas Edukasi Kesehatan dalam Satu Tahun}}{12} \times 100\%$$

$$= \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Jakarta, 03 Januari 2025

Ketua Tim Pelayanan Medik,

Ketua Tim Penunjang Medik,



dr. Indah Pratiwi
NIP. 199207312022032002



Balqis Muharamy, A.Md. Gz
NIP. 199107262022032002

Kepala Sub Bagian Adum,



Hesti Kurniasih, S.E
NIP. 198507012008122002

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan,



Indri Rooslamiati, M.Sc, Apt.
NIP. 197912232005012003

**Presentase Pelatihan Bagi Pegawai
Unit Pelayanan Kesehatan
Tahun 2024**

No.	Nama	Kelas Edukasi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelayanan Prima	Pelatihan Individu
1	Indri Rooslamia, M.Sc., Apt	✓	✓	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) Untuk Umum (20jpl)
2	Hesti Kurniasih, S.E.	✓	✓	Decision Making and Problem Solving (23jpl) Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan (38jpl)
3	dr. Betriza, SpJP	✓	✓	18th Ina SH Hypertension 2024 (16jpl) Practical implementation of Indonesian Heart Failure Guidelines (6jpl)
4	drg. Irawan Soediono	✓	✓	Heading into a new era of sustainable dentistry (6jpl) webinar approaches of nutrition, oral health and platelet rich plasma innovation for improving quality of life related to diseases (6jpl)
5	dr. Sri Mulyani, SpP	✓	✓	Workshop Orientasi Tahap 1 Program WLC (16jpl)
6	dr. Khairunnisa	✓	✓	Webinar Pulse Check
7	dr. Sumita	✓	✓	Webinar Pulse Check
8	drg. Surnetty Aqwari	✓	✓	Practical guidelines for general practitioner in endodontic treatment Webinar Pulse Check
9	drg. Tuti Elvira Nancy	✓	✓	Webinar Pulse Check Heading into a new era of sustainable dentistry (6jpl) webinar approaches of nutrition, oral health and platelet rich plasma innovation for improving quality of life related to diseases (6jpl)

No.	Nama	Kelas Edukasi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelayanan Prima	Pelatihan Individu
10	Mika Susianti, A.Md.Kes	✓	✓	Webinar BDI Emergency Nursing Care (6jpl)
11	Evi Wahyuni, A.Md.Kes	✓	✓	Webinar Melalui Semangat Mohuyula, Kita Wujudkan Transformasi SDM Terapis Gigi Dan Mulut Dalam Mencapai Tujuan Keprofesian Yang Amanah Profesional Dan Manfaat
12	Nurasiah, SKM	✓	✓	Melakukan Pengkajian pada Pasien atau Klien di Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (Terapis Gigi dan Mulut)
13	dr. Khairani Ramadhani	✓	✓	ATLS (3 hari)
14	Yuni Asri Sembiring, Am.Ak			Pelatihan Penanggulang TBC Bagi Tenaga ATLM di Fasyankes (31jpl)
15	Nurul Ayyumi, A.Md.Rad	✓	✓	Teknologi Kedokteran Nuklir Update (Radiografer)
16	Indah Stefiastuti Rahayu, S.AP, M.Tr.A.P.	✓	✓	Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran
17	Lestari, A.Md.Kep	✓	✓	Tatalaksana Keperawatan Jiwa Bagi Perawat (4jpl)
				Emergency Nursing Care Update (6jpl)
				Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di kamar Bedah, ICU dan Hemodialisa (6jpl)
				The Holistic Approach to Diabetic Wound (6jpl)
18	Nur Chasanah, S.Farm Apt.	✓	✓	PIT IAI 2024 Synergizing Global Innovations: Empowering Pharmacy for Sustainable Global Health Solutions (12jpl)
19	dr. Indah Pratiwi	✓	✓	Copy of Simulasi MOOC Pelatihan Manajemen Alur Pelayanan (Care Pathway) Bagi Dokter dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (21jpl)
20		✓	✓	Pelatihan teknis jabfung kepegawaian (55jpl)

No.	Nama	Kelas Edukasi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelayanan Prima	Pelatihan Individu
	Alfi Shariati, S.A.P			Webinar Sosialisasi Pengembangan Kompetensi ASN (2jpl)
21	Tri Tungga Dewi Kusumawati, AMF	✓	✓	Manajemen Tanggap Darurat Bencana Fisioterapis
22	Ahmad Fauzan, A.Md	✓	✓	Peningkatan Kompetensi Komunikasi Antar Pribadi pada Tenaga Kesehatan
24	Shinta Indah Pratiwi, A.Md.Kep	✓	✓	Seminar manajemen bencana dan implementasi trauma healing pada ptsd bagi tenaga kesehatan
25	Citra Sri Martani, Am.Ak	✓	✓	Penanggulangan Tuberkulosis(TBC) bagi Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta (31jpl)
26	Erni Novita Sari, SKM	✓	✓	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) (20jpl) E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (13jpl)
27	Wina Happy Lucky, S.E.	✓	✓	Pelatihan RKAKL
28	Indra Mustholih, S.Kom	✓	✓	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian (120jpl)
29	Anisa Dwi Silvia Fisudurini, Am.Ak	✓	✓	Pemeriksaan mikrobiologi analisa pemeriksaan cairan tubuh dalam menegakan diagnosa tuberkulosis_dpc patelki cirebon
30	Eza Pramedia, A.Md.Kep	✓	✓	Seminar manajemen bencana dan implementasi trauma healing pada ptsd bagi tenaga kesehatan
31	Evi Wulandari, A.Md.Kep	✓	✓	Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) bagi Perawat tahun 2024 Angkatan 5 (60jpl)

No.	Nama	Kelas Edukasi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelayanan Prima	Pelatihan Individu
32	Mohammad Alif Nur Fathoni, A.Md.Rad	✓	✓	Teknologi Kedokteran Nuklir Update (Radiografer)
33	Yudi Dharmawan, A.Md.KG	✓	✓	1. Pengantar PIPK (15jpl) 2. Pelatihan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut (50jpl) 3. Peran KTKI dalam profesi tenaga kesehatan untuk mendukung transformasi kesehatan (5jpl)
34	Fissilmi Kaaffah, A.Md.	✓	✓	Pengolahan Informasi Rekam Medis
35	Balqis Muharamy, A.Md.Gz	✓	✓	Workshop Instrumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
36	Benita Puspita Sari, SKM	✓	✓	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) (20jpl) E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (13jpl)
37	Fany Triany, S.ikom	✓	✓	Workshop Kehumasan Bidang Pelayanan Kesehatan Jakarta, 20-21 maret 2024 Webinar PPPK Sesi II dan III Transformasi Sistem Kesehatan dan Manajemen Kinerja
38	Mutia Karlina, S.Farm, Apt.	✓	✓	-
39	Faya Rahmanda Oktaviola Putri	✓	✓	Pengelolaan Limbah B3 (2jpl)
40	Septian Edi Prianto	✓	✓	Pelatihan Driver Ambulance (Safe Diving)
41	Fenny Alvionita, S.Keb, Bd.	✓	✓	-
42	Indri Yunita, S.E.	✓	✓	-

No.	Nama	Kelas Edukasi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelayanan Prima	Pelatihan Individu
42	Roy Kristiyo, S.E	✓	✓	Pelatihan RKAKL
43	Ramadhani Nurfathur Rahman	✓	✓	-
44	Mukhlis, S.Kom	✓	✓	-
45	Akhmad Khaeroni	✓	✓	-
46	Effendi	✓	✓	-
47	Latifah	✓	✓	-
48	Miftah Farid	✓	✓	-
49	Tyas Tasya	✓	✓	-
50	Saiful Anwar	✓	✓	-
51	Asti Safitria	✓	✓	-

Jakarta, 03 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kemenkes RI

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum



Indri Roostamiati, M.sc. Apt
NIP 197912232005012003



Hesti Kurniasih, S.E.
NIP 198507012008122002

TERLAKSANYA KALIBRASI ALAT-ALAT KESEHATAN
UNIT PELAYANAN KESEHATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2024

Porsentase jumlah alat yang terkalibrasi adalah jumlah alat yang terkalibrasi dalam satu tahun.
 Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah alat yang terkalibrasi dalam 1 tahun / jumlah yang
 dapat dikalibrasi oleh penyedia x 100%

No	Nama Alat	Jumlah Alat	Alat Terkalibrasi	
			BPFK Jakarta	Calibramed
1	AED Defibrilator	5	3	2
2	Alat Hisap Medik (Suction Pump)	4	4	0
3	Autoclave	1	1	0
4	Blood Pressure Monitor (BPM)	9	9	0
5	Body Fat Analyzer	2	1	1
6	Bone Densitometer	1	1	0
7	Centrifuge	2	2	0
8	Defibrilator	2	2	0
9	Dental Unit	4	4	0
10	Electro Stimulator	2	2	0
11	Electrocardiograph (ECG)	5	3	2
12	Fetal Doppler	1	1	0
13	Holter	1	1	0
14	Infra red theraphy	3	2	1
15	Laboratorium Refrigerator	8	8	0
16	Laboratorium Rotator	1	1	0
17	Laser theraphy	2	2	0
18	Micro wave diathermy	2	2	0
19	Micropipet Fix	8	8	0
20	Micropipet Variabel	7	7	0
21	Microscope Lab	1	1	0
22	Monitor Pasien (Bed Side Monitor)	2	2	0
23	Nebulizer	2	2	0
24	Paraffin Bath	1	1	0
25	Portable Oxygen Concentrator	2	2	0
26	Pulse Oximeter (SPO2 Monitor)	3	3	0
27	Radial Shock Wave Therapy (RSWT)	2	2	0

No	Nama Alat	Jumlah Alat	Alat Terkalibrasi	
			BPFK Jakarta	Calibrated
28	Regulator Oksigen (Flowmeter)	7	5	2
29	Short Wave Diathermy	1	1	0
30	Static Cycle	1	0	1
31	Tensimeter (Sphygmomanometer)	6	6	0
33	Thermometer Infrared	5	4	1
34	Timbangan Bayi	2	1	1
35	Timbangan Dewasa	2	2	0
36	Treadmill	1	1	0
37	Ultra Sound Therapy (UST)	2	2	0
38	Ultra violet lamp (UV Lamp)	4	4	0
39	Ultrasonography (USG)	1	1	0
40	UV Sterilizer	3	0	3
41	Ventilator	3	1	2
42	Vortex Mixer	1	1	0
43	Thermohygrometer	1	1	0
44	General X-Ray	1	1	0
45	Panoramic	1	1	0
46	Dental Intra Oral	1	1	0
47	X-Ray Mamography	1	0	1
48	Dental Aerosol	4	0	4
49	Cryo Therapy	1	0	1
50	Suction Manual	1	0	1
51	Electro Stimulator	2	0	2
52	Traksi	1	0	1
Jumlah Alat		136	110	26
Total		136	136	

Kalibrasi Alat Kesehatan = $\frac{\text{jumlah alat yang terkalibrasi dalam 1 tahun}}{\text{jumlah yang dapat dikalibrasi oleh penyedia}} \times 100\%$

$= \frac{110}{136} \times 100\% = 80.88\%$

$= \frac{110}{136} \times 100\% = 80.88\%$

Jakarta, 03 Januari 2025
Ketua Tim Penunjang


Balqis Muharamy, A.Md.Gz
NIP 199107262022032002


Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Indri Rooslamati, M.Sc., Apt
NIP 197912232005012003

**REALISASI ANGGARAN
UNIT PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024**

No	Bulan	Target	Realisasi	Capaian
1	Januari	5%	1,04%	1,09%
2	Februari	10%	4,84%	48,40%
3	Maret	15%	13,05%	87,00%
4	April	20%	18,91%	94,55%
5	Mei	30%	25,75%	85,83%
6	Juni	40%	32,94%	82,35%
7	Juli	45%	37,43%	83,18%
8	Agustus	50%	42,13%	84,26%
9	September	60%	46,55%	77,58%
10	Oktober	70%	53,59%	76,56%
11	November	80%	66,66%	83,33%
12	Desember	95%	98,01%	103,17%

Sumber : Omspan 2024

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kemenkes RI



Indri Rooslamati, M.sc. Apt
NIP 197912232005012003

Kasubbag Administrasi dan Umum



Hesti Kurniasih, S.E.
NIP 198507012008122002

**LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU
UNIT PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024**

Laporan keuangan tepat waktu adalah laporan keuangan yang diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KPPN.

Jenis Laporan Keuangan	Pelaksanaan	Tepat Waktu	Presentase
Laporan Pertanggungjawaban	12 kali	12 kali	100%
Jumlah	12 kali	12 kali	100%

Perhitungan:

Laporan keuangan yang diserahkan tepat waktu x 100% = $\frac{12}{12} \times 100\%$

Jumlah laporan keuangan yang diserahkan 12

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kemenkes RI



Indri Rooslamati, M.sc. Apt
NIP 197912232005012003

Kasubbag Administrasi dan Umum



Hesti Kurniasih, S.E.
NIP 198507012008122002

**PRESENTASE REALISASI TARGET PENDAPATAN PNBP
UNIT PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024**

No	Bulan	Pendapatan PNBP	Realisasi PNBP Berjalan	Target PNBP	Presentase
1	Januari	Rp51.459.083	Rp51.459.083	Rp449.078.000	11,46%
2	Februari	Rp50.560.121	Rp102.019.204	Rp449.078.000	22,72%
3	Maret	Rp51.777.524	Rp153.796.728	Rp449.078.000	34,25%
4	April	Rp50.689.030	Rp204.485.758	Rp449.078.000	45,53%
5	Mei	Rp53.987.592	Rp258.473.350	Rp449.078.000	57,56%
6	Juni	Rp55.008.247	Rp313.481.597	Rp449.078.000	69,81%
7	Juli	Rp56.820.679	Rp370.302.276	Rp449.078.000	82,46%
8	Agustus	Rp63.060.437	Rp433.362.713	Rp449.078.000	96,50%
9	September	Rp57.210.972	Rp490.573.685	Rp449.078.000	109,24%
10	Oktober	Rp58.222.451	Rp548.796.136,00	Rp449.078.000	122,21%
11	November	Rp52.536.166	Rp601.332.302,00	Rp449.078.000	133,90%
12	Desember	Rp59.432.620,00	Rp660.764.922,00	Rp449.078.000	147,14%

Sumber : Omspan 2024

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kemenkes RI



Indri Rooslamati, M.sc. Apt
NIP 197912232005012003

Kasubbag Administrasi dan Umum



Hesti Kurniasih, S.E.
NIP 198507012008122002

**PRESENTASE REALISASI ANGGARAN BERSUMBER PNBP
UNIT PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024**

No	Bulan	Realisasi PNBP	Total Anggaran PNBP	Persentase
1	Januari	Rp0	Rp359.262.000	0,00%
2	Februari	Rp7.990.000	Rp359.262.000	2,22%
3	Maret	Rp24.163.000	Rp359.262.000	6,73%
4	April	Rp7.364.000	Rp359.262.000	2,05%
5	Mei	Rp22.850.000	Rp359.262.000	6,36%
6	Juni	Rp8.742.500	Rp359.262.000	2,43%
7	Juli	Rp25.840.000	Rp359.262.000	7,19%
8	Agustus	Rp16.870.000	Rp359.262.000	4,70%
9	September	Rp63.000.000	Rp359.262.000	17,54%
10	Oktober	Rp18.660.000	Rp359.262.000	5,19%
11	November	Rp6.847.200	Rp359.262.000	1,91%
12	Desember	Rp155.205.700	Rp359.262.000	43,20%
Total		Rp357.532.400	Rp359.262.000	99,52%

Sumber : Omspan 2024

Mengetahui,
 Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
 Kemenkes RI

Kasubbag Administrasi dan Umum




 Indri Rooslamati, M.sc. Apt
 NIP 197912232005012003


 Hesti Kurniasih, S.E.
 NIP 198507012008122002

**PRESENTASE REALISASI ANGGARAN BERSUMBER RM
UNIT PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2024**

No	Bulan	Realisasi RM	Total Anggaran RM	Persentase
1	Januari	Rp171.136.034,00	Rp16.020.143.000	1,07%
2	Februari	Rp613.949.512,00	Rp16.020.143.000	3,83%
3	Maret	Rp1.320.896.804,00	Rp16.020.143.000	8,25%
4	April	Rp952.486.099,00	Rp16.020.143.000	5,95%
5	Mei	Rp1.098.059.654,00	Rp16.020.143.000	6,85%
6	Juni	Rp1.168.632.102,00	Rp16.020.143.000	7,29%
7	Juli	Rp710.258.745,00	Rp16.020.143.000	4,43%
8	Agustus	Rp752.280.486,00	Rp16.020.143.000	4,70%
9	September	Rp660.498.435,00	Rp16.020.143.000	4,12%
10	Oktober	Rp1.134.070.795,00	Rp16.020.143.000	7,08%
11	November	Rp2.134.243.934,00	Rp16.020.143.000	13,32%
12	Desember	Rp4.979.262.848,00	Rp16.020.143.000	31,08%
Total		Rp357.532.400	Rp16.020.143.000	97,98%

Sumber : Omspan 2024

Mengetahui,
 Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
 Kemenkes RI

Kasubbag Administrasi dan Umum



Indri Rooslamjati, M.sc. Apt
 NIP 197912232005012003



Hesti Kurniasih, S.E.
 NIP 198507012008122002

Terwujudnya Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Integrasi

No	Uraian Pekerjaan	Keterangan
1	Penambahan kolom "Pemeriksaan Fisik" pada laporan kunjungan pasien klinik umum	Selesai
2	Penambahan kolom "advice" pada Laporan Kunjungan Pasien Klinik Umum	Selesai
3	Penambahan kolom "Tindakan" pada laporan kunjungan pasien klinik umum	Selesai
4	Optimasi kode pada laporan kunjungan pasien laboratorium karena tidak muncul hasilnya	Selesai
5	Pengiriman tabel database daftar kode dokter untuk integrasi LIS	Selesai
6	Perbaikan bug tidak bisa input obat pada saat pasien Klinik Gigi Pratama dirujuk	Selesai
7	Koordinasi integrasi SIMKLINIK dan LIS	Selesai
8	Backup Database	Selesai
9	Backup Script	Selesai
10	Laporan dokumen simklinik	Selesai
11	Integrasi dengan SatuSehat	Selesai
12	Integrasi dengan BPJS Kesehatan	Selesai

Jumlah aplikasi yang dilakukan pengembangan/pemeliharaan updating system informasi /
 Jumlah kebutuhan update aplikasi sistem informasi X 100% = 12/12 X 100% = 100%

Mengetahui,
 Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
 Kemenkes RI



Indri Rooslamati, M.sc. Apt
 NIP 197912232005012003

Kasubbag Administrasi dan Umum



Hesti Kurniasih, S.E.
 NIP 198507012008122002